



RENSTRA TA. 2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas P3AP2KB untuk lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan dan dinamika isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang semakin kompleks. Isu-isu seperti kesetaraan gender, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan angka stunting, peningkatan kualitas keluarga, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk memerlukan penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik internal Dinas P3AP2KB maupun stakeholder eksternal. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman dan arah bagi seluruh jajaran Dinas P3AP2KB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang maju, sejahtera, dan berkeadilan gender.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memiliki keterbatasan dan dapat disempurnakan di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi perbaikan berkelanjutan. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau.



Tanjungpinang, September 2025

Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau

Burhanuddin, S. Hut., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197103201998031008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	68
3.2. Strategi.....	70
3.3. Arah kebijakan	73
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan	75
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	121
BAB V PENUTUP.....	137
5.1 Kesimpulan	137
5.2 Kesimpulan Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Sarana dan Prasarana (Aset) Pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	20
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (%)	31
Tabel 2.3	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.4	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.5	Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Masing-Masing Program pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	38
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	41
Tabel 3.1	Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Yang Disertai Dengan Indikator Dan Target Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.....	44
Tabel 3.2	Tahapan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	46
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.1.	Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	75
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan..	105
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.....	110
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	121
Tabel 4.5	IKK Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau	16
Gambar 2.2	Pegawai pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Status Kepegawaian Tahun 2025	18
Gambar 2.3	Pegawai pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	19
Gambar 2.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024	21
Gambar 2.5	Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024	22
Gambar 2.6	Capaian IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	23
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2.8	Perbandingan IKG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024	25
Gambar 2.9	Capaian IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	26
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024.....	27
Gambar 2.11	Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024	28
Gambar 2.12	Capaian IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	29
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023	30
Gambar 2.14	Anggaran, Realisasi Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perempuan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan, baik sebagai pendidik pertama dalam keluarga maupun sebagai agen perubahan di masyarakat. Pemberdayaan perempuan memegang peran krusial dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara akan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Ketika perempuan diberdayakan, mereka tidak hanya meningkatkan taraf hidup pribadi, tetapi juga memberi kontribusi besar dalam menciptakan keluarga yang lebih sehat, anak-anak yang lebih terdidik, dan masyarakat yang lebih sejahtera. Investasi pada perempuan berarti investasi pada generasi masa depan yang lebih berkualitas.

Pemberdayaan perempuan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Memberikan ruang bagi perempuan untuk aktif di berbagai sektor, baik formal maupun informal, negara dapat memanfaatkan seluruh potensi penduduknya secara maksimal. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan memperkaya perspektif dan inovasi, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan bukan hanya isu keadilan gender, tetapi juga strategi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dapat disimpulkan bahwa ketika perempuan diberdayakan melalui akses pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi dan politik yang setara, mereka mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan potensi mereka secara maksimal. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang akan lebih mudah mengembangkan kecerdasan emosional, sosial, dan intelektual. Demikian pula, perempuan yang merasa aman dan dihargai akan lebih berdaya dan produktif. Oleh karena itu, sinergi

antara pemberdayaan dan perlindungan ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui pengendalian dan keluarga berencana jumlah kelahiran dan membantu menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak melebihi daya dukung lingkungan dan ketersediaan sumber daya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mudah mengelola kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara efektif. Selain itu, keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit cenderung dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih optimal, sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah pun meningkat.

Dampak positif dari pengendalian penduduk ini secara langsung berkontribusi pada keberhasilan pembangunan daerah. Ketika jumlah penduduk terkendali, beban anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyebaran penduduk yang merata juga membantu mengurangi tekanan urbanisasi dan mendorong pembangunan yang seimbang antarwilayah. Keberhasilan program KB tidak hanya menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB). Mengacu pada hasil pilkada ditahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si

Untuk menterjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis

tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang vital dalam sistem perencanaan pembangunan, dengan dasar hukum yang kuat dari dua undang-undang utama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Renstra didefinisikan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), baik di tingkat nasional oleh Kementerian/Lembaga maupun di tingkat daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif, dirancang untuk dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga atau unit kerja selama periode 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan. Konsisten dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik menguatkan kedudukan Renstra di tingkat daerah. Renstra sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatannya selama 5 tahun, yang selaras dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan penjelasan dari kedua undang-undang tersebut, Renstra sebagai instrumen kunci yang menjembatani dokumen perencanaan jangka menengah yang lebih luas dengan implementasi program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat unit pelaksana.

Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan memperhatikan beberapa dokumen lainnya, antara lain KLHS RPJMD, RTRW, RIPJPID, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dokumen risiko pembangunan daerah dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, proses penyusunan Renstra sendiri meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (6) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) Review APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra. (7) Review Rancangan Akhir Renstra dan (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down, dan pendekatan yang berorientasi pada substansi yang meliputi tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal

ini perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra diarahkan untuk mencapai visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 hingga tahun Renja Tahun 2030. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);

8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
28. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
29. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
40. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029). Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya..

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang didalamnya memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan. Selain itu menjelaskan mengenai permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, menguraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, dan penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui IKK.
5. BAB V PENUTUP, menguraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah pada Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 menginformasikan tugas dan fungsi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, memberikan informasi terkait mitra Renstra Dinas P3AP2KB dan beberapa dukungan serta kerjasama yang pernah dilaksanakan oleh Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan pada masing-masing unit kerja pada Dinas

P3AP2KB adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan.
- b. pelaksanaan pemetaan Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- c. penyiapan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;

- d. pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan terhadap iklim usaha bidang ekonomi;
- j. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan khusus anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;

- f. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- i. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- d. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penyediaan Data;
- j. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan hak perempuan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

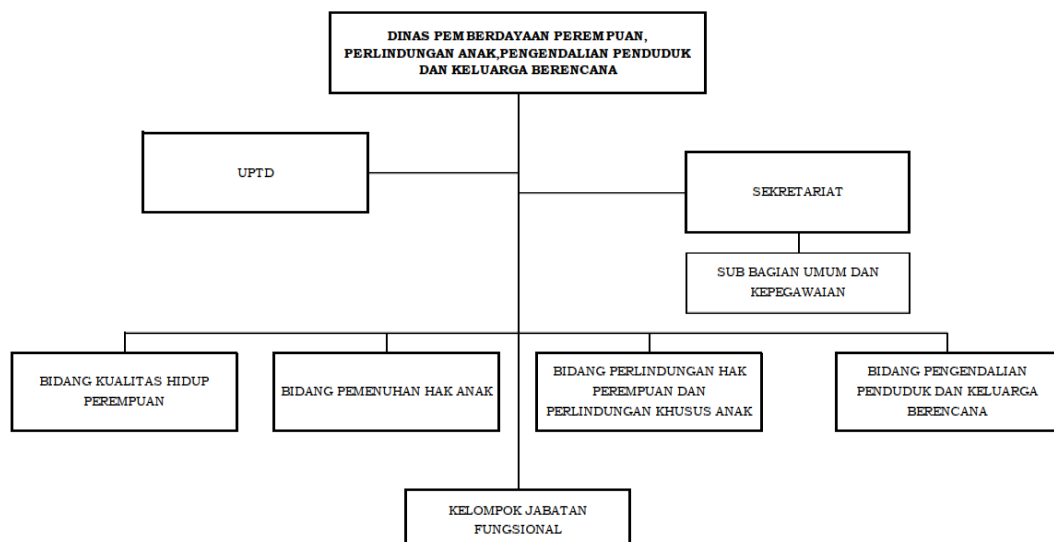
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- b. pelaksanaan pemetaan pengendalian penduduk tingkat provinsi kepulauan riau;
- c. pelaksanaan analisis parameter pengendalian penduduk;

- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, KIE dan peningkatan kapasitas terkait pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan desain program pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan penguatan jejaring, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi stakeholder dan organisasi kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Provinsi dalam pembangunan keluarga;
- i. pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

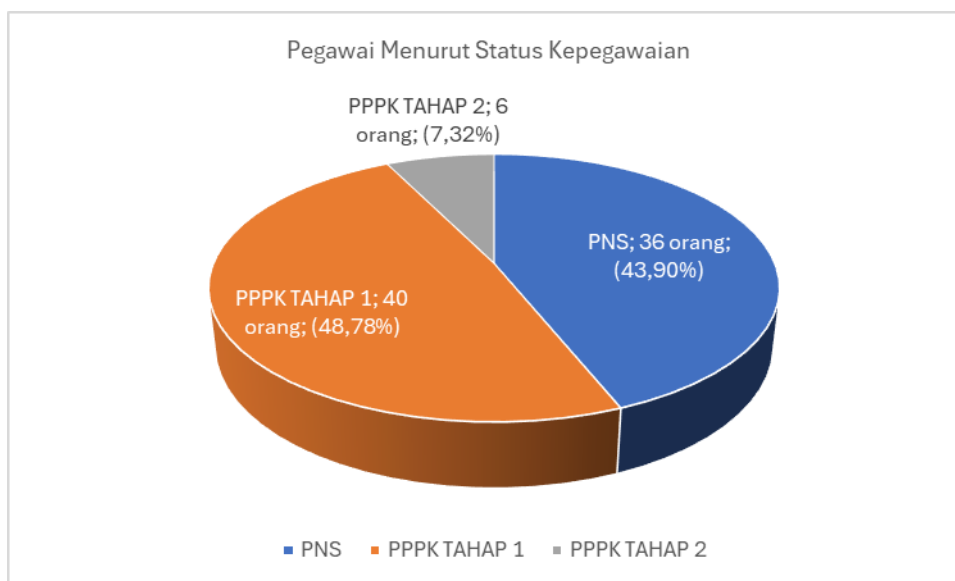
Sumber daya perangkat daerah pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau meliputi sumberdaya aparatur perangkat daerah dan sarana prasarana (aset) yang menjadi penunjang kerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data status kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kepulauan Riau untuk tahun 2025, total jumlah pegawai adalah 82 orang. Komposisi status kepegawaian menunjukkan dominasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebanyak 40 pegawai, atau sekitar 48,78% berstatus sebagai PPPK Tahap 1. Ini menjadikan PPPK Tahap 1 sebagai kategori pegawai terbanyak, yang selanjutnya disusul oleh PNS yang berjumlah 36 orang, merepresentasikan 43,90% dari keseluruhan pegawai. Proporsi yang hampir seimbang antara PPPK Tahap 1 dan PNS menunjukkan adanya transisi atau penyeimbangan dalam struktur kepegawaian di dinas tersebut. Sementara itu, PPPK Tahap 2 merupakan kelompok terkecil, dengan hanya 6 pegawai, atau 7,32% dari total. Proporsi yang relatif kecil ini mungkin menunjukkan bahwa rekrutmen PPPK Tahap 2 masih dalam tahap awal atau lebih terfokus pada posisi-posisi spesifik yang tidak sebanyak pada Tahap 1.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 sangat bergantung pada pegawai PPPK, terutama PPPK Tahap 1, dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini dapat menjadi indikasi strategi pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan formasi atau meningkatkan efisiensi dengan merekrut tenaga kontrak berbasis kinerja, di samping mempertahankan tenaga PNS yang menjadi tulang punggung birokrasi.



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau. 2025

Gambar 2.2. Pegawai pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Status Kepegawaian Tahun 2025

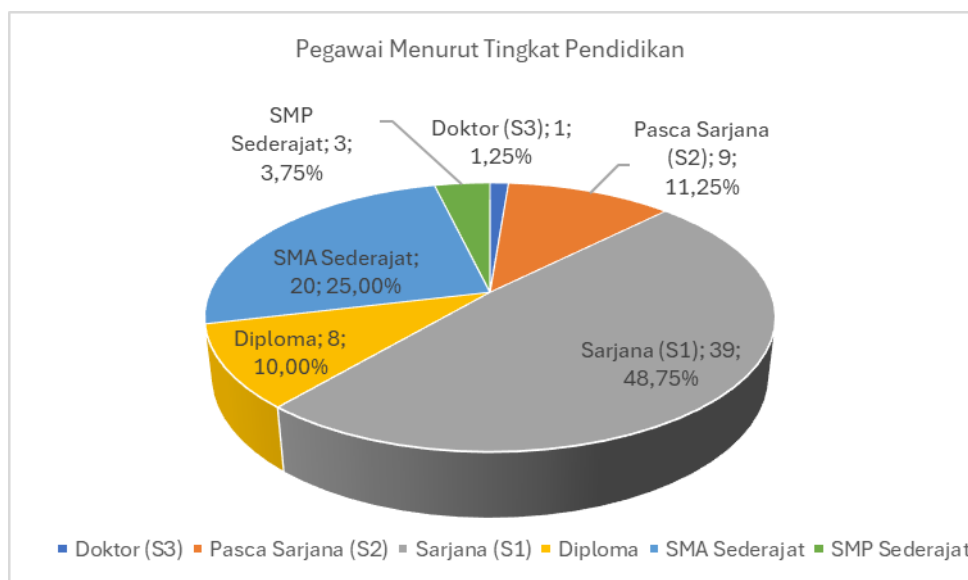
Berdasarkan data pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kepulauan Riau pada tahun 2025, terlihat adanya dominasi perempuan yang signifikan dalam komposisi kepegawaian. Dari total 82 pegawai, mayoritas adalah perempuan. Sebanyak 61 pegawai perempuan merepresentasikan 74,39% dari keseluruhan tenaga kerja di DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini sangat dominan dibandingkan dengan pegawai laki-laki yang hanya berjumlah 21 orang, atau setara dengan 25,61% dari total.



Komposisi ini sangat relevan mengingat fokus dan tupoksi dinas yang berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingginya representasi perempuan di DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi aset berharga dalam menjalankan program-program yang sensitif gender dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang isu-isu perempuan dan anak. Kehadiran mayoritas pegawai perempuan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran dinas. Selain itu, dominasi perempuan dalam

struktur kepegawaian ini mencerminkan karakteristik pekerjaan yang mungkin lebih menarik bagi perempuan, atau memang disengaja untuk memperkuat perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kepulauan Riau pada tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi, namun juga terdapat representasi yang signifikan dari jenjang pendidikan menengah. Untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1) mendominasi komposisi pegawai dengan jumlah 39 orang, yang merepresentasikan 48,75% dari total jumlah pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari pegawai memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya setara S1, mengindikasikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai secara akademis untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau. 2025

Gambar 2.3. Pegawai pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jumlah pegawai dengan lulusan SMA Sederajat yang menempati posisi kedua terbanyak dengan 20 pegawai, atau 25% dari total pegawai. Keberadaan jumlah yang signifikan dari lulusan SMA ini menunjukkan adanya peran-peran teknis atau administratif yang tidak selalu membutuhkan gelar sarjana, atau sebagai bagian dari struktur kepegawaian yang beragam. Kemudian, pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) berjumlah 9 orang (11,25%) dan Diploma berjumlah 8 orang (10%).

Kehadiran pegawai dengan pendidikan S2 menunjukkan adanya keahlian dan kapasitas analitis yang lebih mendalam, sementara lulusan Diploma kemungkinan mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan praktis spesifik. Pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu Doktor (S3), berjumlah 1 orang (1,25%), yang mengindikasikan adanya keahlian sangat spesifik atau posisi kepemimpinan yang membutuhkan kualifikasi tertinggi. Untuk SMP Sederajat menjadi tingkat pendidikan terendah dengan 3 orang (3,75%).

Secara keseluruhan, struktur pendidikan di DP3AP2KB Kepulauan Riau pada tahun 2025 cenderung didominasi oleh lulusan Sarjana, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas SDM. Namun, keberadaan latar belakang pendidikan yang beragam juga mendukung fleksibilitas dalam penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 secara keseluruhan, sebagian besar jenis sarana dan prasarana yang terdaftar berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Hal ini terlihat dari banyaknya item yang seluruh unitnya (100%) tercatat dalam kategori "Baik", seperti Kendaraan Roda 2, Laptop, sebagian besar jenis kursi dan meja kerja, kamera digital, berbagai peralatan rumah tangga dan kantor seperti Gordyn, Blender, Rice Cooker, hingga peralatan spesifik seperti CCTV, Alat Pemanas Kopi, dan Wireless Microphone. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan atau akuisisi aset-aset ini cukup optimal. Perincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Kondisi Sarana dan Prasarana (Aset) Pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda 4	unit	6	0	6
2	Kendaraan Roda 2	unit	3	1	4
3	AC	unit	15	5	20
4	Printer	unit	25		4
5	Laptop	unit	20	5	15

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
6	Kursi Pejabat Eselon II	unit	1		1
7	Kursi Pejabat Eselon III	unit	6		6
8	Kursi Pejabat Eselon IV	unit	14		14
9	Kursi Staf	unit	60		60
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II	unit	1		1
11	Meja Kerja Pejabat Eselon III	unit	6		6
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	unit	14		14
13	Meja Kerja Staf	unit	60		60
14	Komputer Desktop / PC	unit	35		35
15	Camera Digital	unit	4		4
16	Stand Water /Dispenser	unit	7		7
17	Gordyn	unit	24		24
18	Blender	unit	2		2
19	Karpet	unit	1		1
20	Rice Cooker	unit	3		3
21	Televisi	unit	7		7
22	Tiang Bendera	unit	2		2
23	Partisi	paket	3		3
24	Lemari Kaca Expo	unit	6		6
25	Jabra Speak 8100 uc	unit	1		1
26	Logitech Group Video Converence	unit	1		1
27	CCTV	unit	3		3
28	Thermometer	unit	1		1
29	Mesin Pemetong Rumput	unit	1	1	2
30	Teralis	unit	22		22
31	Handpone	unit	1		1
32	Alat Pemanas Kopi	unit	2		2
33	Tempat Tidur Korban	unit	8		8
34	Wireless Microphone	unit	1		1
35	Audio Amplifier	unit	1		1
36	Audio Master Control	unit	1		1
37	Headphone - Portable Multimedia Heaset	unit	1		1
38	Mesin Pompa Air	unit	2		2
39	Tandon Tangki Air	unit	1		1
40	Speaker Stand	unit	2		2
41	Tangga	unit	2		2
42	Vacuum Sealer	unit	2	1	3

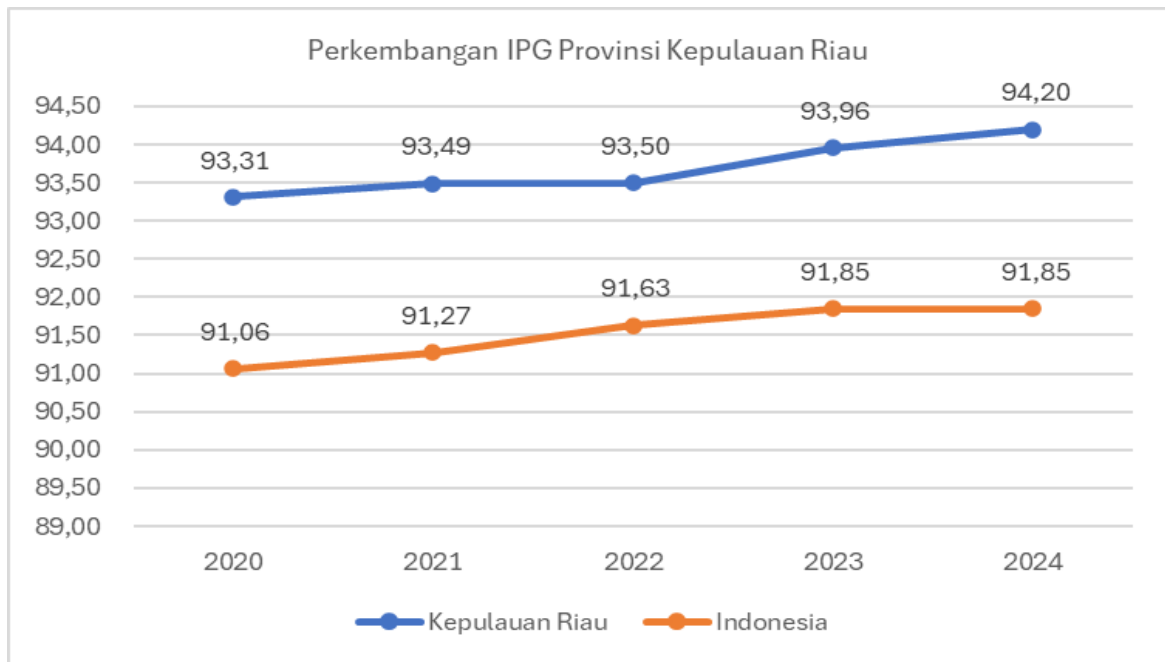
No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
43	Proector Infocus	unit	2		2
44	Scanner	unit	3		3

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara makro ditunjukkan oleh beberapa indikator, yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kesenjangan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Perlindungan Anak dan tingkat Pengendalian Penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren positif baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 hingga 2024. IPG Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesenjangan gender di berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan di berbagai sektor terlihat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara.

Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan capaian IPG yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. IPG Kepulauan Riau meningkat dari 93,31 pada tahun 2020 menjadi 94,20 pada tahun 2024. Capaian yang secara signifikan lebih tinggi ini menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kesenjangan gender yang lebih rendah dibandingkan nasional. Tren peningkatan yang stabil ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program lokal yang efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memberikan peluang yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki di wilayah tersebut. Konsistensi dalam peningkatan IPG di Kepulauan Riau menegaskan bahwa provinsi ini memiliki fondasi yang kuat dalam pembangunan berbasis gender.

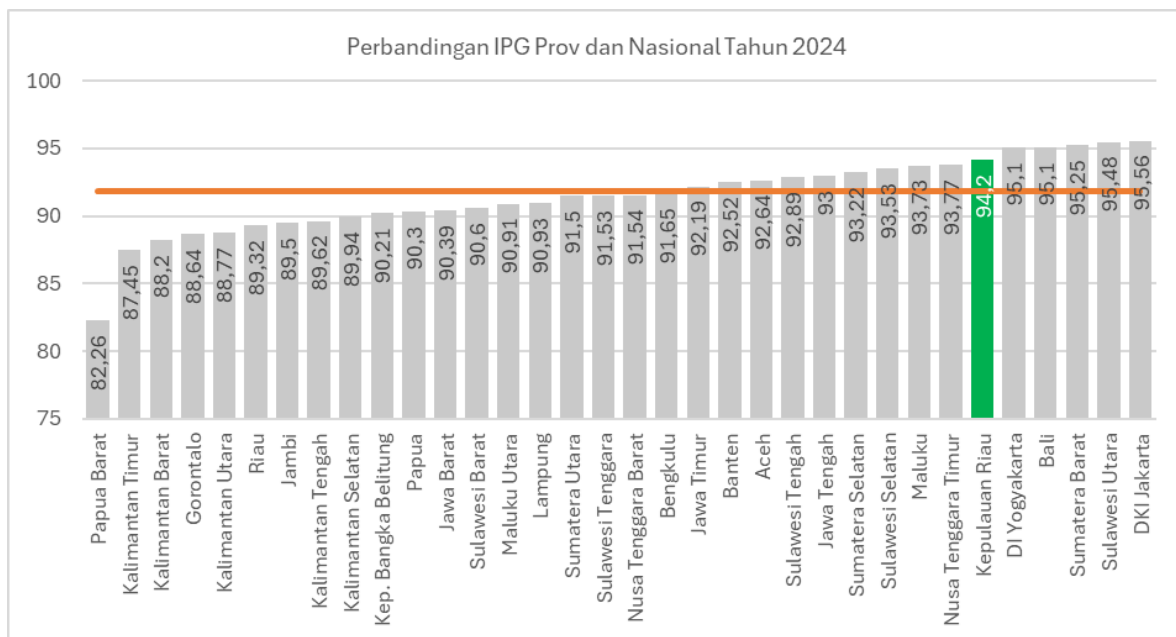


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik perbandingan IPG Prov dan Nasional Tahun 2024, terlihat jelas posisi Provinsi Kepulauan Riau dalam konteks Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia menunjukkan berada di atas rata-rata IPG Nasional yang berada di sekitar angka 91,85. Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2024 yang dilihat dari capaian IPG sebesar 94,20, Kepulauan Riau berhasil melampaui rata-rata nasional secara signifikan dan menempatkan dirinya di antara provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi di Indonesia. Posisi ini berada di atas sebagian besar provinsi lain, dan hanya dilampaui oleh beberapa provinsi seperti Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, yang memiliki IPG tertinggi.

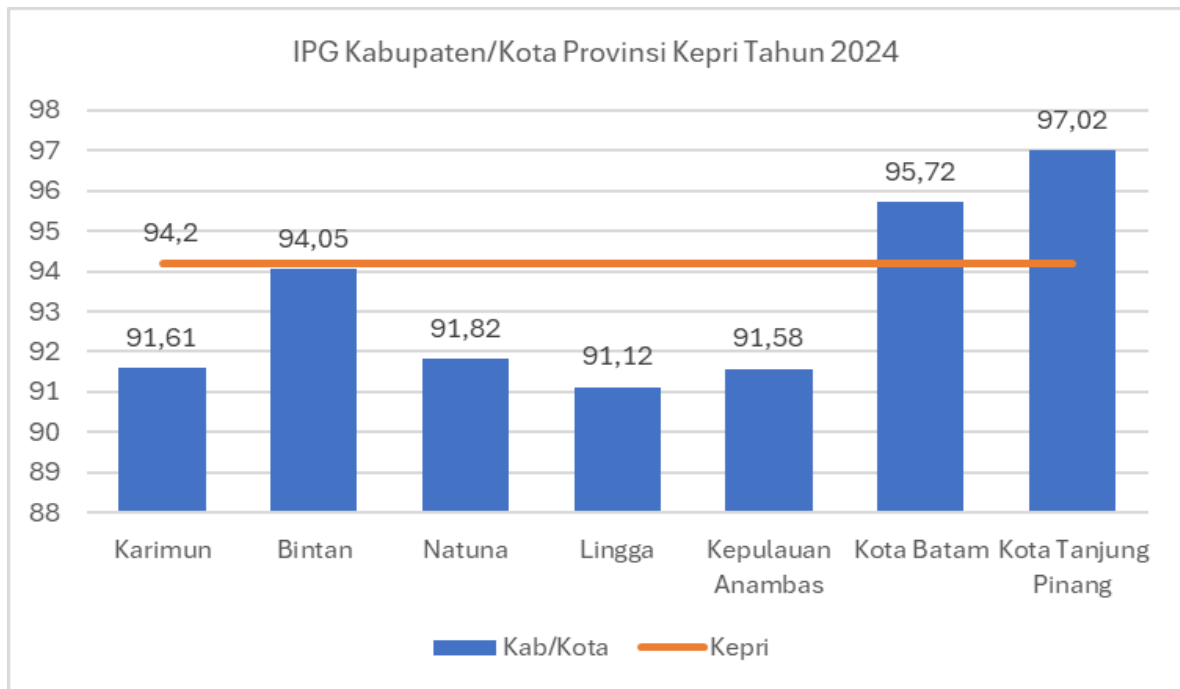
Capaian ini mengindikasikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek pembangunan utama seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Keunggulan Kepulauan Riau dibandingkan mayoritas provinsi lain menunjukkan efektivitas kebijakan dan program yang berfokus pada pemberdayaan gender dan peningkatan akses setara bagi semua penduduk. Meskipun ada provinsi dengan capaian sedikit lebih tinggi, posisi Kepulauan Riau yang berada di klaster atas menegaskan komitmen dan keberhasilan provinsi ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil gender.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.5. Perbandingan IPG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024

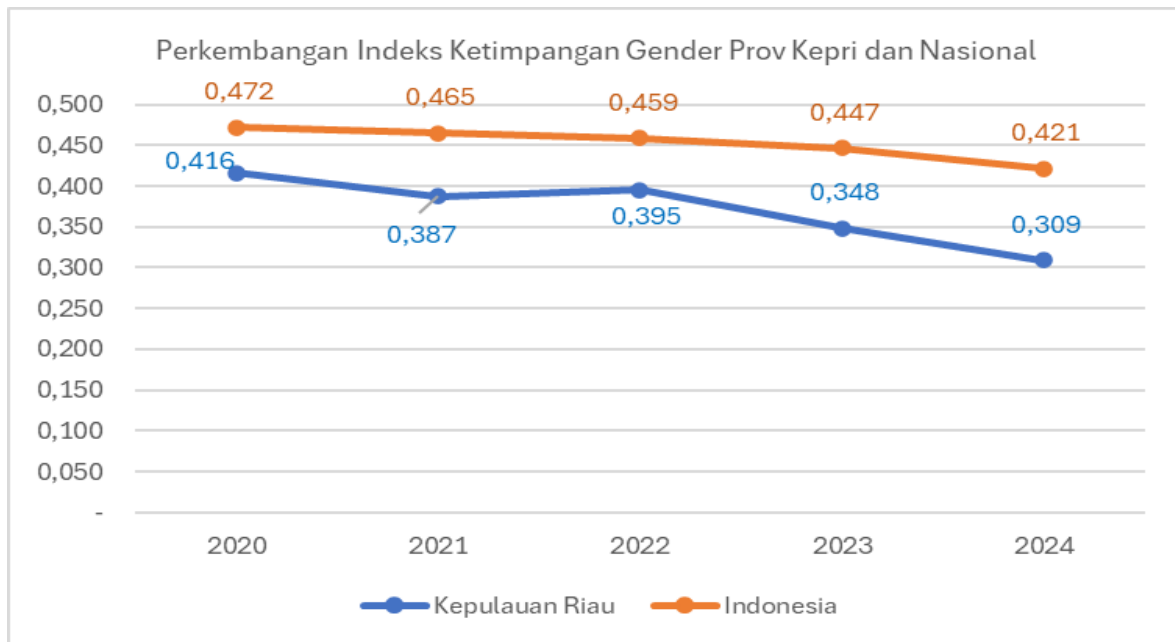
Berdasarkan grafik IPG Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, terlihat adanya variasi capaian di antara wilayah-wilayah dalam provinsi tersebut, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,20. Dua kota, yaitu Kota Batam dengan IPG 95,72 dan Kota Tanjung Pinang dengan IPG 97,02, menunjukkan kinerja yang jauh di atas rata-rata provinsi, bahkan Kota Tanjung Pinang menjadi yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua pusat perkotaan ini telah berhasil secara signifikan mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Akan tetapi di sisi lain, kabupaten-kabupaten seperti Karimun (91,61), Natuna (91,82), Lingga (91,12), dan Kepulauan Anambas (91,58) berada di bawah rata-rata provinsi. Meskipun demikian, Kabupaten Bintan dengan IPG 94,05 menunjukkan capaian yang sangat mendekati rata-rata provinsi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis gender di Provinsi Kepulauan Riau masih terpusat di wilayah perkotaan, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesetaraan gender di wilayah-wilayah kabupaten, khususnya Lingga dan Karimun, agar dapat menyamai capaian kota-kota besar di provinsi tersebut.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.6. Capaian IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berdasarkan data yang disajikan, baik Provinsi Kepulauan Riau maupun tingkat Nasional menunjukkan tren positif dalam mengurangi ketimpangan gender dari tahun 2020 hingga 2024. Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dalam mengurangi ketimpangan gender. IKG Kepulauan Riau menurun dari 0,416 pada tahun 2020 menjadi 0,309 pada tahun 2024. Penurunan ini tidak hanya konsisten tetapi juga lebih tajam dibandingkan dengan penurunan IKG Nasional. Pada tahun 2024, IKG Kepulauan Riau (0,309) jauh lebih rendah daripada IKG Nasional (0,421), menunjukkan bahwa provinsi ini telah berhasil secara signifikan mengurangi ketimpangan gender. Capaian ini menempatkan Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah terdepan dalam hal kesetaraan gender di Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan daerah yang efektif, dukungan masyarakat, atau karakteristik demografi dan ekonomi provinsi tersebut.

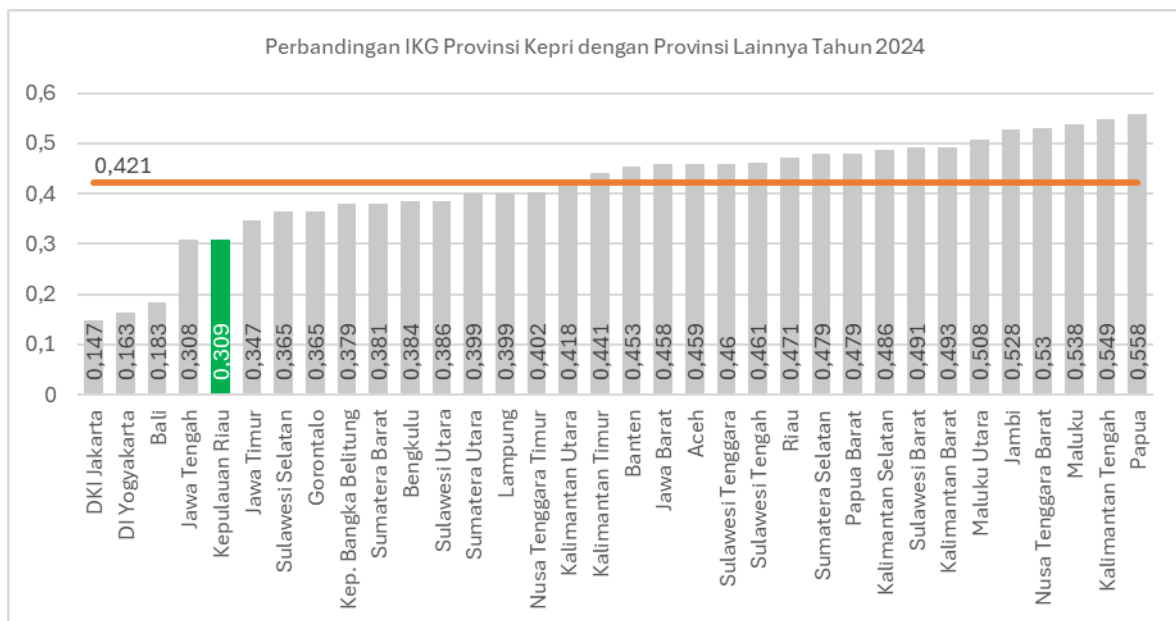


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024

Kondisi IKG Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam mengurangi ketimpangan gender pada tahun 2024. Kondisi nilai IKG sebesar 0,309, Kepulauan Riau tidak hanya berada jauh di bawah rata-rata nasional (0,421), tetapi juga menempatkan dirinya sebagai provinsi dengan IKG terendah ketiga di seluruh Indonesia. Hanya DKI Jakarta (0,147) dan DI Yogyakarta (0,183) yang memiliki tingkat ketimpangan gender lebih rendah.

Posisi ini mengindikasikan keberhasilan signifikan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai kesetaraan gender di berbagai dimensi, termasuk kesehatan reproduksi, pemberdayaan (politik dan pendidikan), serta partisipasi ekonomi. Capaian ini menempatkan Kepulauan Riau di antara provinsi-provinsi termaju dalam hal kesetaraan gender, dan ini dapat menjadi contoh praktik terbaik bagi provinsi lain yang masih menghadapi tantangan ketimpangan yang lebih tinggi, seperti beberapa provinsi di Kalimantan, Maluku, hingga Papua yang masih memiliki IKG di atas 0,5.

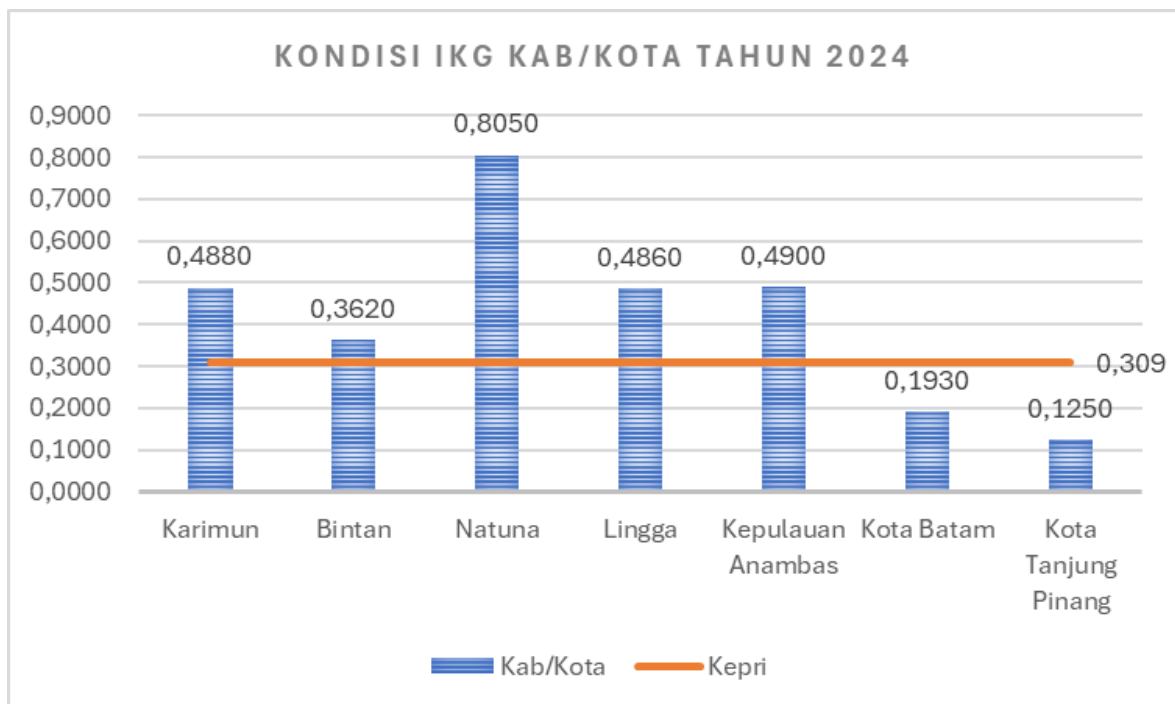


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.8. Perbandingan IKG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024

Kondisi IKG Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menunjukkan variasi signifikan dalam tingkat ketimpangan gender di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata IKG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 adalah 0,309, yang direpresentasikan oleh garis oranye pada grafik. Perlu diingat bahwa semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender. Data menunjukkan bahwa Kota Tanjung Pinang memiliki IKG terendah dengan 0,1250, diikuti oleh Kota Batam dengan 0,1930. Capaian kedua kota ini jauh di bawah rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa mereka adalah wilayah dengan kesetaraan gender terbaik di Kepulauan Riau. Ini kemungkinan disebabkan oleh urbanisasi, akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di pusat kota.

Sebagian besar kabupaten menunjukkan IKG yang lebih tinggi dan melampaui rata-rata provinsi, mengindikasikan adanya ketimpangan gender yang lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Kabupaten Natuna menunjukkan tingkat ketimpangan gender tertinggi dengan IKG mencapai 0,8050. Angka ini sangat jauh di atas rata-rata provinsi dan menjadi outlier yang menonjol, menandakan adanya tantangan besar dalam mencapai kesetaraan gender di Natuna. Kabupaten lain seperti Karimun (0,4880), Lingga (0,4860), dan Kepulauan Anambas (0,4900) juga memiliki IKG yang cukup tinggi, mendekati 0,5. Satu-satunya kabupaten yang berada di bawah rata-rata provinsi adalah Kabupaten Bintan dengan IKG 0,3620, meskipun masih lebih tinggi dari Batam dan Tanjungpinang.

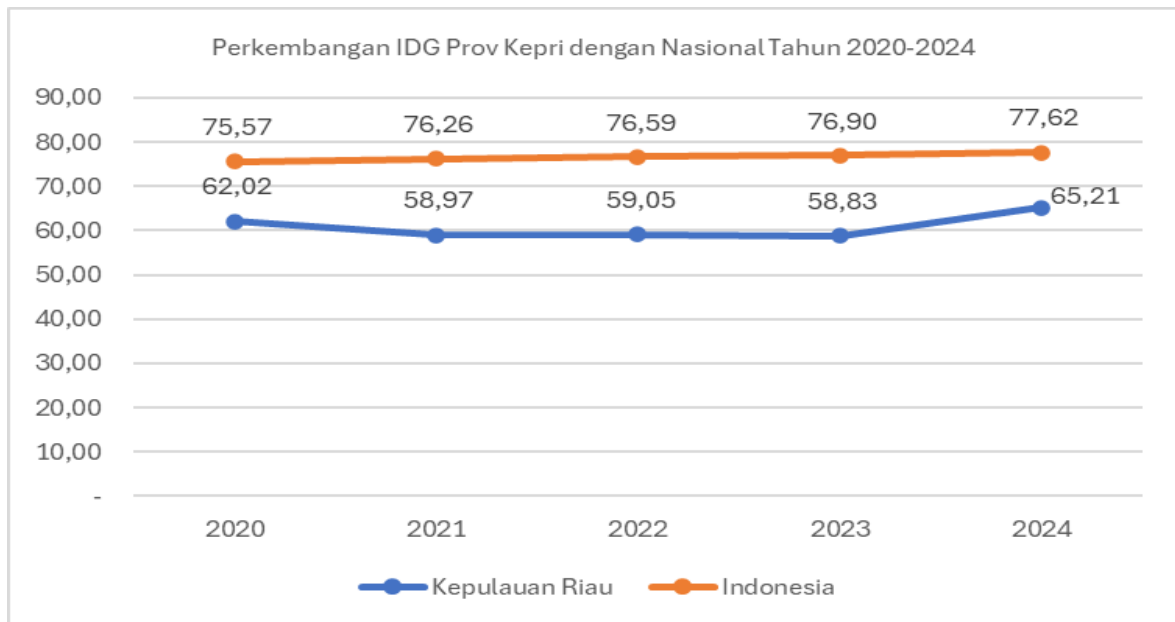


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.9. Capaian IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis dan secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2020, IDG Kepulauan Riau adalah 62,02. Angka ini sempat menurun di tahun 2021 dan 2023, berada di kisaran 58-59. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, mencapai 65,21. Meskipun ada peningkatan di tahun terakhir, nilai IDG Kepulauan Riau masih jauh di bawah IDG Nasional. Disparitas ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memberdayakan perempuan di sektor politik dan ekonomi dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Lonjakan di tahun 2024 perlu diamati lebih lanjut apakah merupakan tren berkelanjutan atau hasil dari intervensi spesifik di tahun tersebut.

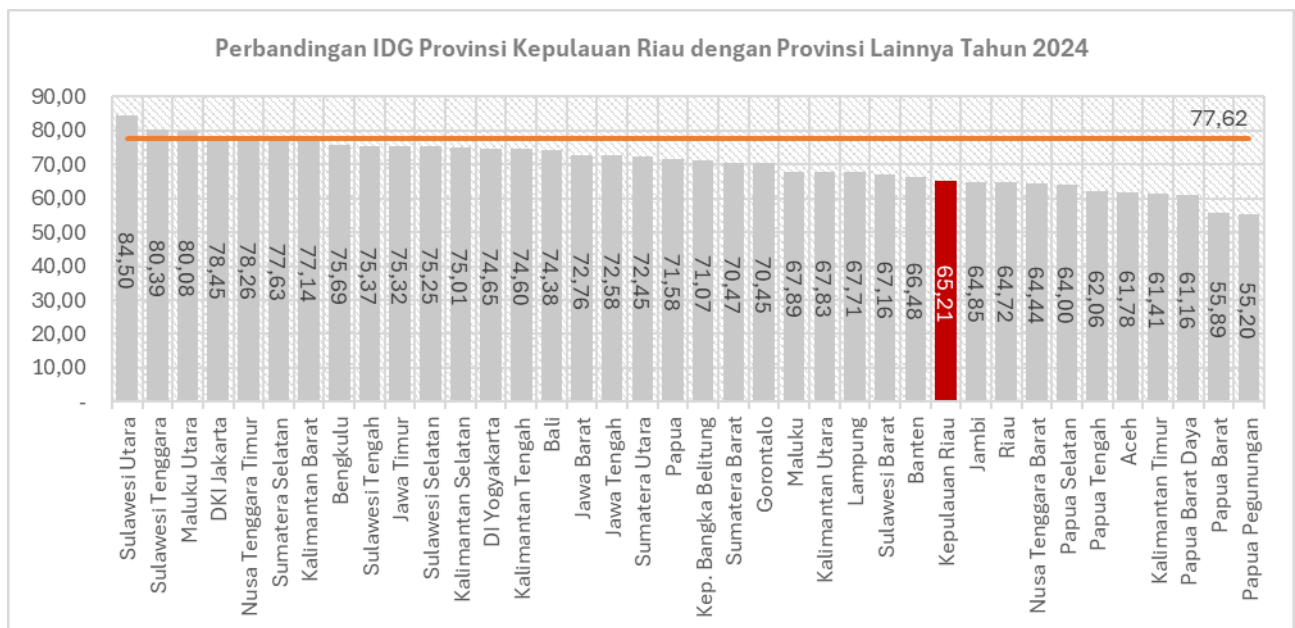
Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan di tahun 2024 untuk Kepulauan Riau, masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam hal pemberdayaan gender dibandingkan dengan tingkat nasional. Upaya yang lebih terfokus perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan ekonomi, serta memastikan perempuan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi di Kepulauan Riau.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan dalam Indeks Pemberdayaan Gender, dengan nilai 65,21. Angka ini menempatkan Kepulauan Riau secara signifikan di bawah rata-rata IDG Nasional (77,62) dan jauh di belakang sebagian besar provinsi lain di Indonesia. Bahkan, Kepulauan Riau berada di klaster bawah, dengan hanya beberapa provinsi seperti Jambi, Riau, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pegunungan yang memiliki IDG lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki tantangan besar dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan posisi manajerial, serta dalam memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja. Selengkapnya kondisi IDG Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Indonesia dapat dilihat pada Grafik berikut.

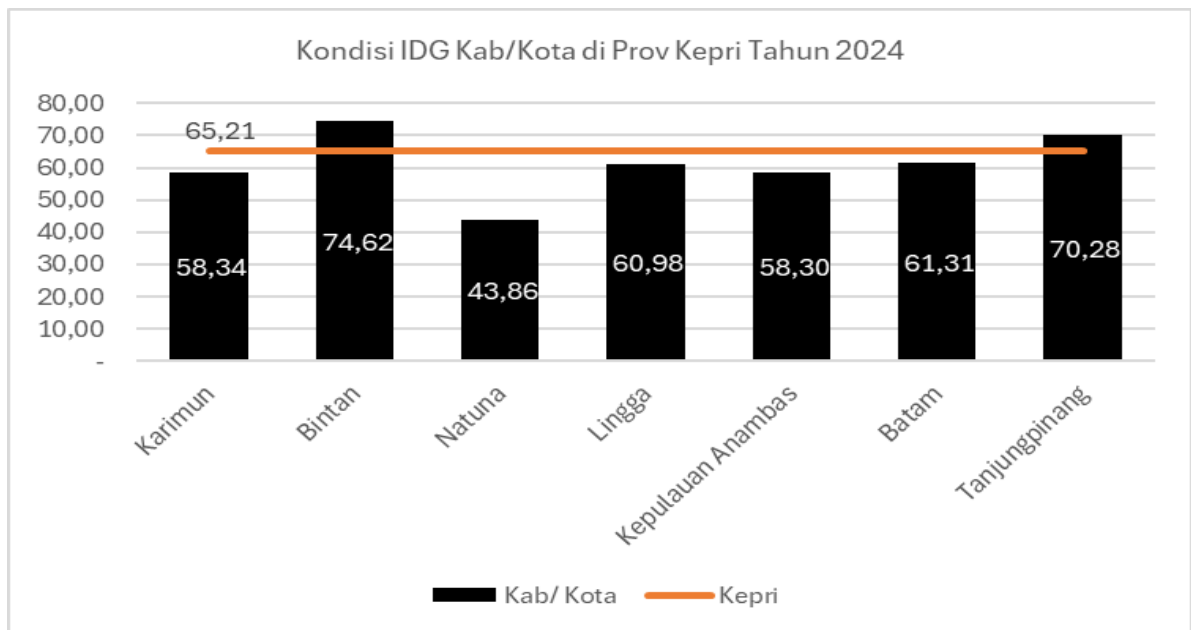


Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.11. Perbandingan IDG Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lainnya Tahun 2024

Kondisi IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya disparitas yang mencolok dalam pencapaian pemberdayaan gender antar wilayah. Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang menjadi wilayah dengan kinerja terbaik. Kabupaten Bintan mencatat IDG tertinggi sebesar 74,62, melampaui rata-rata provinsi secara signifikan. Kota Tanjung Pinang juga menunjukkan kinerja yang kuat dengan IDG 70,28, yang juga di atas rata-rata provinsi. Capaian ini mengindikasikan bahwa kedua wilayah ini memiliki tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam bidang politik dan ekonomi, serta penguasaan sumber daya yang lebih baik dibandingkan wilayah lain.

Sebaliknya, sebagian besar kabupaten/kota lainnya menunjukkan nilai IDG di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Natuna memiliki IDG terendah, yaitu hanya 43,86, yang mengindikasikan tantangan besar dalam pemberdayaan gender di wilayah tersebut. Kabupaten Karimun (58,34) dan Kepulauan Anambas (58,30) juga berada jauh di bawah rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa mereka menghadapi hambatan serupa dalam mendorong partisipasi dan penguasaan sumber daya oleh perempuan. Sementara itu, Lingga (60,98) dan Batam (61,31) berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya, masih diperlukan peningkatan signifikan untuk mencapai tingkat pemberdayaan yang lebih baik.



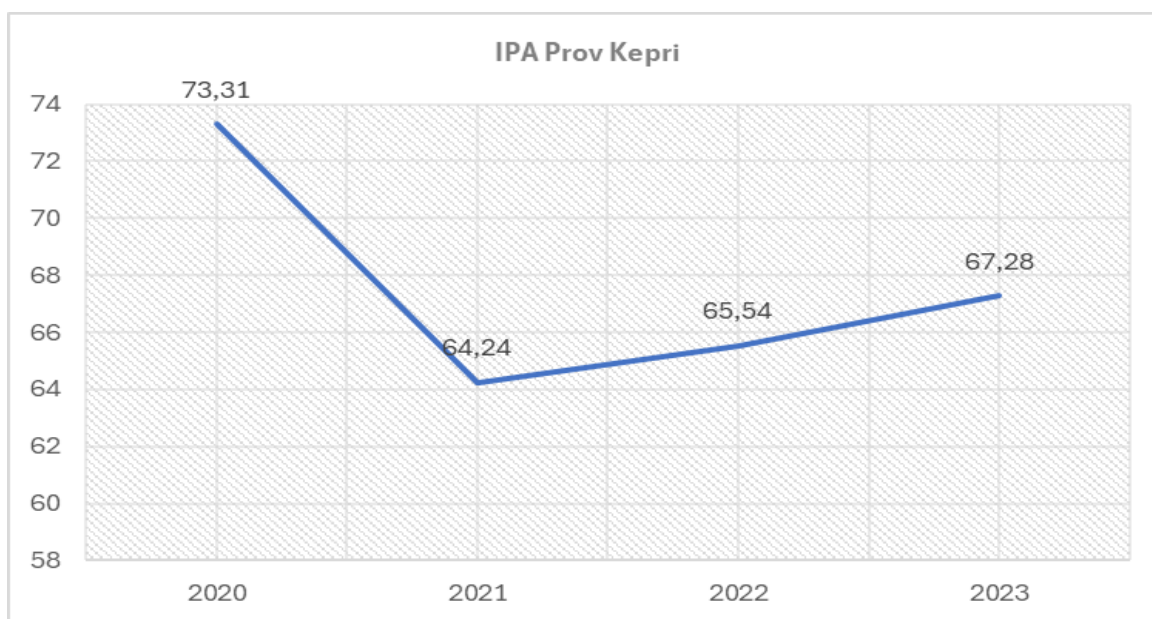
Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.12. Capaian IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Untuk melihat kondisi kualitas perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menggunakan indikator Indeks Perlindungan Anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPA, semakin baik tingkat perlindungan anak. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan fluktuasi yang menarik dalam periode 2020-2023. Pada tahun 2020, IPA Kepulauan Riau berada di angka tertinggi, yaitu 73,31. Angka ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut, upaya perlindungan anak di Kepulauan Riau berada pada level yang cukup baik. Namun, terjadi penurunan yang signifikan di tahun berikutnya. Pada tahun 2021, IPA turun drastis menjadi 64,24. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda, yang mungkin menyebabkan gangguan pada layanan perlindungan anak, akses pendidikan, kesehatan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan anak.

IPA Kepulauan Riau menunjukkan tren pemulihan yang positif, di mana pada tahun 2022, IPA naik menjadi 65,54, dan kemudian melanjutkan peningkatannya menjadi 67,28 di tahun 2023. Meskipun terjadi pemulihan, nilai IPA pada tahun 2023 (67,28) masih belum berhasil kembali ke level sebelum pandemi di tahun 2020 (73,31). Secara keseluruhan,

menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mengalami tantangan besar dalam perlindungan anak pada awal pandemi, yang terlihat dari penurunan tajam IPA di tahun 2021. Namun, upaya pemulihan telah dilakukan dan menunjukkan hasil positif dalam dua tahun berikutnya. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembalikan dan bahkan melampaui capaian IPA tahun 2020, guna memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal di seluruh wilayah Kepulauan Riau.



Sumber : BPS Nasional, 2025

Gambar 2.13. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

Sementara itu, guna menggambarkan kinerja pengendalian penduduk antara lain dapat dilihat dari upaya pengendalian penduduk melalui indikator laju pertumbuhan penduduk. Data laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang menarik, dengan pola peningkatan di tahun-tahun awal diikuti oleh penurunan di tahun-tahun berikutnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan puncak pada tahun 2022 dengan angka 3,15%, yang merupakan kenaikan signifikan dari 2,02% di tahun 2020. Namun, setelah mencapai puncaknya, laju pertumbuhan provinsi menurun drastis menjadi 1,51% di tahun 2023 dan sedikit melambat menjadi 1,50% di tahun 2024. Jika dilihat per kabupaten/kota, sebagian besar wilayah menunjukkan pola yang serupa dengan provinsi:

- **Puncak Pertumbuhan di 2022:** Hampir semua kabupaten/kota mencatat laju pertumbuhan tertinggi mereka pada tahun 2022. Misalnya, Kepulauan Anambas dan Kota Batam sama-sama mencapai puncaknya di 3,45% dan 3,44% secara berturut-turut. Karimun mencapai 2,83%, Bintan 2,23%, Natuna 2,74%, Lingga 2,44%, dan Kota Tanjung Pinang 3,02%.
- **Penurunan Signifikan Pasca-2022:** Setelah 2022, laju pertumbuhan di semua kabupaten/kota mengalami penurunan tajam. Kabupaten Lingga menunjukkan penurunan yang paling drastis, dari 2,44% di 2022 menjadi 1,01% di 2024. Karimun juga mengalami penurunan yang substansial.
- **Wilayah dengan Laju Pertumbuhan Relatif Lebih Tinggi (2023-2024):** Meskipun terjadi penurunan secara umum, Kota Batam tetap menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2023 (1,72%) dan 2024 (1,69%), menunjukkan statusnya sebagai pusat ekonomi yang terus menarik penduduk. Disusul oleh Bintan (1,45%) dan Natuna (1,37%).
- **Wilayah dengan Laju Pertumbuhan Relatif Lebih Rendah (2023-2024):** Lingga (1,01%) dan Karimun (1,1%) menunjukkan laju pertumbuhan terendah di tahun 2024, mengindikasikan dinamika demografi yang lebih stagnan dibandingkan wilayah lain.

Secara keseluruhan, data ini merefleksikan periode pertumbuhan penduduk yang cepat pada tahun 2022 di seluruh Kepulauan Riau, kemungkinan didorong oleh faktor ekonomi dan migrasi. Namun, tren tersebut kemudian melambat dan cenderung stabil pada tahun 2023 dan 2024, dengan Kota Batam tetap menjadi magnet utama bagi pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	1,72	1,77	2,83	1,11	1,1
Bintan	1,11	1,43	2,23	1,47	1,45
Natuna	1,62	1,72	2,74	1,39	1,37
Lingga	1,31	1,54	2,44	1,02	1,01
Kepulauan Anambas	2,32	2,1	3,45	1,38	1,36
Kota Batam	2,32	2,11	3,44	1,72	1,69
Kota Tanjung Pinang	1,9	1,87	3,02	1,17	1,15
Kepulauan Riau	2,02	1,94	3,15	1,51	1,50

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2025)

Selain melihat kinerja pada tingkatan makro, kinerja pelayanan perangkat daerah juga dilihat berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang digambarkan berdasarkan indikator kinerja dan anggaran. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pemerintahan daerah berperan penting dalam menciptakan kesetaraan gender, meningkatkan kesejahteraan perempuan, serta menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, program, dan layanan yang mendukung peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik, serta memastikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Program seperti pelatihan keterampilan dan akses modal bagi perempuan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, layanan pengaduan bagi korban kekerasan, serta kampanye edukasi mengenai hak anak menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif di tingkat daerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis data, pemerintahan daerah dapat memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam pembangunan, serta setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				r Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	5,38	8,83	11,24	12,63	13,51	64,13	27,29	12,37	6,97	27,69
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	4,18	4,26	5,33	5,51	5,00	- 0,02	- 0,20	- 0,03	0,10	- 0,04
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan,	%	25,71	21,05	29,46	28,96	25,05	0,22	- 0,29	0,02	0,16	0,03

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				r Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)											
4	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	-	-	100,00	100,00	95,00	-	-	100,00	5,00	52,50
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi	%	-	-	8,89	8,89	13,33	-	-		49,94	49,94
6	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	-	-		100,00	100,00	-	-			100,00
7	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	-	-	28,71	28,64	28,01	-	-	- 0,24	- 2,20	- 1,22
8	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	-	-	72,10	81,39	51,16	-	-	12,88	- 37,14	- 12,13
9	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya	%	-	-	60,21	61,08	71,43	-	-	1,44	16,94	9,19
10	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Nilai	-	-		64,81	66,00	-	-		1,84	1,84

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, terdapat 3 indikator kinerja yang menunjukkan perkembangan kurang baik dalam lima tahun terakhir, yaitu pada indikator Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan, dan Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak. Ketiga indikator tersebut menjadi catatan penting terhadap penetapan kinerja lima tahun berikutnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mengelola pertumbuhan penduduk secara seimbang serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program perencanaan keluarga yang efektif.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan kependudukan yang mencakup pengendalian angka kelahiran, peningkatan akses layanan kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga agar lebih mandiri dan sejahtera. Melalui program Keluarga Berencana (KB), masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan jumlah dan jarak kelahiran guna menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menekan angka stunting, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mengoptimalkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kebijakan yang berbasis data serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, penyuluh KB, dan organisasi masyarakat, pengendalian penduduk dapat berjalan efektif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan capaian indikator kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				r Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,20	2,53	2,16	2,17	2,15	- 0,13	0,17	- 0,00	0,01	0,01
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	44,20	40,40	37,13	44,00	56,10	- 8,60	- 8,09	18,50	27,50	7,33
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Nilai	-	-	-	64,81	66,00	-	-	-	1,84	1,84

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2025 (diolah)

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengacu pada

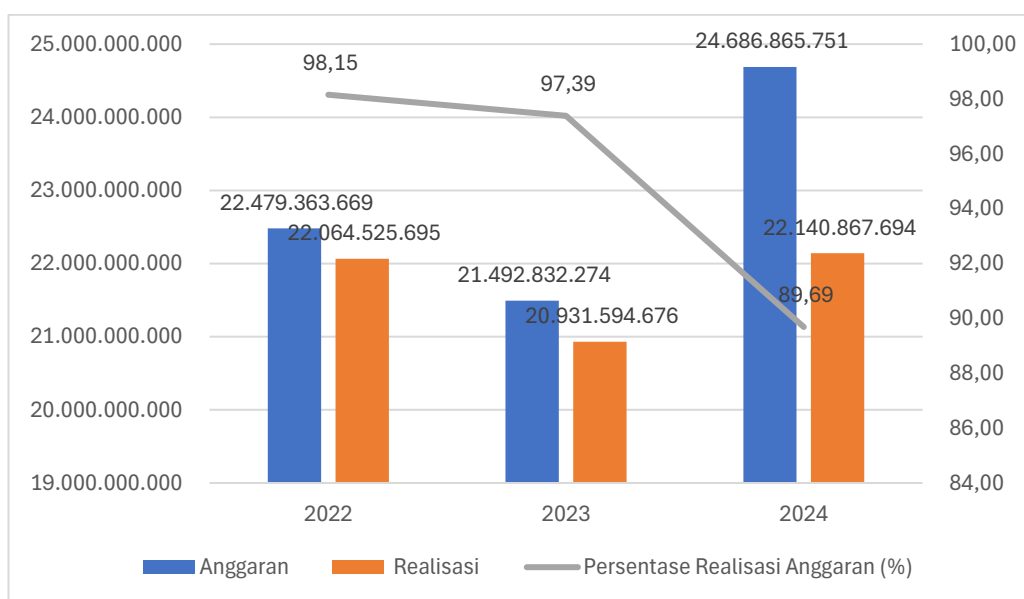
Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	95,00		100,00	100,00	95,00
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Provinsi	%	-	5,40	5,50	11,82	-	11,26	12,63	13,51		208,52	229,64	114,30
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tingkat Provinsi	%	-	11,10	11,10	8,00	-	8,89	8,89	13,33		80,09	80,09	166,63
4	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	-	-	100,00	93,43	-	-	100,00	100,00			100,00	107,03
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	-	44,07	43,88	43,70	-	29,46	28,96	25,05		149,59	151,52	174,45
6	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	-	28,75	28,90	29,00	-	28,71	28,64	28,01		99,86	99,10	96,59
7	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	-	46,15	51,28	46,51	-	72,10	81,39	51,16		156,23	158,72	110,00
8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat Peringkat KLA Madya	%	-	73,60	74,60	71,43	-	60,21	61,08	71,43		81,81	81,88	100,00
9	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Rasio	-	-	-	5,60	-	-	-	5,00				112,00
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	-	-	9,25	22,00	-	-	20,60	12,10				- 22,70
11	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	-	-	59,70	62,00	-	-	64,81	66,00			108,56	106,45
12	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		-	86,64	86,94	-	-	80,86	82,09	-		93,33	94,42	
13	Contraceptive Prevalence Rate	%	-		49,50	-	-		44,00	-			88,89	

Kondisi kinerja anggaran pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021-2024 trennya sebagian besar mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 22.479.363.669 ditahun 2020 menjadi Rp. 24.686.865.751. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut, realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2022 mencapai 98,15%, sedangkan terendah ditahun 2024 sebesar 89,69%. Gambaran alokasi anggaran dan realisasinya pada inas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14. Anggaran, Realisasi Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

Alokasi anggaran pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dideskripsikan ke dalam 10 program yang meliputi :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
10. Program Keluarga Berencana

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2024 pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Masing-Masing Program pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	3.397.104.498	849.532.300	1.210.303.454	-	3.326.787.432	823.793.115	1.160.863.721	-	97,93	96,97	95,92
2	Program Perlindungan Perempuan	-	801.025.500	2.544.927.800	1.409.636.144	-	758.974.586	2.471.725.521	1.395.157.851	-	94,75	97,12	98,97
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	2.623.371.027	2.596.434.963	4.086.542.944	-	2.579.093.315	2.554.134.062	4.049.956.331	-	98,31	98,37	99,10
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	26.904.655	10.000.000	8.000.000	-	11.808.676	9.949.044	7.867.530	-	43,89	99,49	98,34
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	1.153.618.092	612.372.814	555.960.895	-	1.139.351.687	608.972.424	555.738.048	-	98,76	99,44	99,96
6	Program Perlindungan Khusus Anak	-	939.493.000	558.225.200	149.882.100	-	874.917.772	548.902.874	149.069.100	-	93,13	98,33	99,46
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	13.150.393.222	13.485.380.397	13.077.767.840	-	13.013.602.426	13.092.593.031	12.639.842.751	-	98,96	97,09	96,65
8	Program Pengendalian Penduduk	-	10.000.000			-	8.252.780			-	82,53		
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	-	377.453.675	825.958.800	178.372.374	-	351.737.021	811.711.605	178.372.362	-	93,19	98,28	100,00
10	Program Keluarga Berencana	-		10.000.000	4.010.400.000	-		9.813.000	2.004.000.000	-		98,13	49,97

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Perempuan secara umum, Kelompok perempuan rentan, perempuan Korban Kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, dan Perempuan yang terlibat dalam wirausaha/UMKM.
2. Organisasi Perempuan dan Kelompok Masyarakat yang merupakan mitra dalam upaya pemberdayaan.
3. Anak-anak secara umum, Anak Korban Kekerasan (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran), anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan layanan darurat, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, anak membutuhkan dukungan kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
4. Masyarakat dan kelompok/komunitas peduli anak
5. Perusahaan yang terlibat dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia.
6. Pasangan usia subur

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Beberapa mitra yang menjadi partner kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Polda Provinsi Kepulauan Riau
2. Polres di setiap Kabupaten/Kota
3. Kantor Kementerian Agama
4. Pengadilan Agama
5. Pengadilan Negeri
6. Lembaga Bantuan Hukum
7. Perguruan Tinggi
8. Perangkat Daerah terkait
9. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kinerja pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jangkauan pelayanan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, terutama dalam mendapatkan data dan informasi dimasyarakat
2. Belum optimalnya fasilitasi dan penguatan terhadap lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
3. Kenaikan anggaran responsif gender belum optimal dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga
5. Masih lemahnya ketersediaan data gender dan anak dalam mendukung analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah
6. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan Kabupaten/Kota layak anak mencapai Peringkat Madya
7. Masih ditemukannya kekerasan terhadap anak, baik dilingkungan rumah tangga, sekolah maupun pertemanan
8. Rendahnya kemampuan keluarga menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak didunia kerja dan pernikahan dini.
9. Masih belum optimalnya edukasi terhadap orang tua dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
10. Belum optimalnya peningkatan pengelolaan pelayanan dan pembinaan kepersertaan ber KB dengan kondisi cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi meningkat dan kinerja peningkatan pemakaian kontrasepsi Modern realtif kecil kenaikannya
11. Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan pembangunan keluarga

2.2.2. Isu strategis

Penetapan isu strategis pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan pendekatan permasalahan, memperhatikan isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan

potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB.

1. Isu Strategis Global

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama

jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara

berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang

meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

c. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital

perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: *nanotechnology*; *blockchain*; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (*3D printing*, *rapid prototyping*, *powder bed system*, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence (AI)* menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja

konvensional, seperti properti perkantoran dan *real estate*. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10

juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

e. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7

diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan

ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun,

pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

g. Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual– metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

h. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative*

Designs termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi *elektrolisis Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari *Local Factor Productivity*

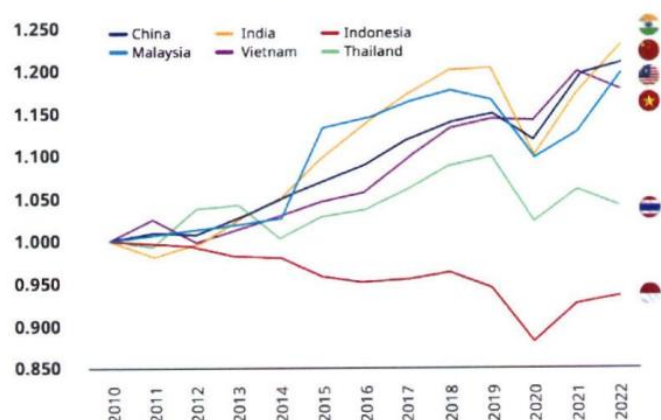
selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Rata-rata Pertumbuhan TFP
Index Antarnegara



Total Factor Productivity Index
2010-2022 (2010=1,0)



Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024|), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan

terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi *particulate* mater 2,5 (*World Health organization*, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (*Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai

negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyesuaian aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan

terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input

pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Battic Dry Index Level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan

pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

a. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. Intensitas isu ini menjadi lebih besar karena tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah kabupaten/kota yaitu antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain terutama dengan Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi kesehatan dilihat dari Usia Harapan Hidup dengan capaian sebesar 75,12 tahun pada tahun 2024. Kondisi Pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata lama sekolah sebesar 10,50 tahun pada tahun 2024, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,27 tahun pada tahun 2024.

b. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal.

Sebesar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah laut atau seluas 17.012,97 km², sisanya 4.21 persen atau seluas 8.269,708 km² merupakan daratan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau mendukung potensi lestari sumber daya perikanan hingga sebanyak 1.1 juta ton per tahun. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menyimpan segudang sumber daya kemaritiman, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan beragam komoditi ekspor unggulan, seperti lobster dan kepiting. Pada sektor perikanan tangkap, sebagian besar potensi berasal dari pengelolaan perikanan di wilayah Laut Cina Selatan dan Kabupaten Natuna, tepatnya pada Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, serta Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup besar terutama dengan adanya peningkatan sebesar 43% pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang.

Kondisi ini besar dipengaruhi oleh faktor peralihan profesi masyarakat sekitar menjadi nelayan akibat krisis ekonomi global. Namun demikian di saat yang sama dengan potensi sumber daya yang begitu besar rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Arah pengembangan kewilayahan mengacu pada dokumen RPJPN periode 2025-2045 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang nasional pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau Blue Economy. Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut memiliki potensi maritim yang sangat besar, sehingga potensi ini mampu menjadi titik tolak pembangunan yang transformatif bagi Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan.

Tentunya fokus pembangunan ini harus sinergi dengan berbagai tujuan dan sumber daya lainnya, dalam hal ini aspek-aspek pembangunan lain perlu diarahkan kepada koridor pembangunan yang berbasis maritim. Misalnya, aspek ekonomi akan mengalir pada arus ekonomi biru yang memberdayakan perairan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, pengarusutamaan maritim ke dalam komponen lain dapat menopang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih optimal.

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebesar 4,78%. Dibandingkan dengan provinsi lain diwilayah Sumatera, kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Bangka Belitung.

Dari berbagai kebijakan yang ada, upaya perwujudan kesejahteraan sosial memiliki konvergensi yang cukup tinggi utamanya pada program kemiskinan, bersifat lintas sektor dalam implementasinya. Akurasi data dan desain penentuan program, serta penentuan sasaran penerima manfaat sangatlah penting. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat permasalahan menyangkut penggunaan basis data penerima manfaat dari program penghapusan kemiskinan yang menyebabkan upaya intervensi tidak dapat berhasil optimal. Pemerintah

perlu memetakan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan beberapa alternatif intervensi yakni: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat (bantuan sosial dan subsidi serta penyelenggaraan jaminan sosial yang merata. (2) Meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat (pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta akses pekerjaan). (3) Meminimalisasi kantong kemiskinan (peningkatan akses layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, konvergensi anggaran, konsolidasi program, dan peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan).

Pengangguran juga masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. TPT Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,38 persen. Dibandingkan provinsi lain diwilayah Sumatera, TPT Provinsi Kepulauan Riau merupakan tertinggi. Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2024 sebesar 0,357. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,017 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,340. Indeks Gini sebesar 0,357 ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kepri masih berada dalam kategori sedang. Posisi relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi.

d. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya

berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (multilevel governance) dapat diinisiasi dengan joint outcome sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kepulauan Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan e-government di Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem e-government pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan

implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

e. Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal

Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan pedoman sekaligus panutan dan pegangan hidup bermasyarakat. Kondisi pembangunan pada periode sebelumnya masih menunjukkan bahwa pelestarian budaya terutama Budaya Melayu sebagai akar nilai Masyarakat Kepulauan Riau belum optimal diimplementasikan. Oleh karena itu, pada periode pembangunan

kedepan penguatan budaya lokal menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian. Penguatan budaya lokal mencakup pelestarian budaya yang tangible (terlihat) dan intangible (tidak terlihat) seperti karya Bahasa/sastra Melayu, pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.

Perlu upaya aktif dari seluruh pihak untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran terhadap pemajuan kebudayaan terutama dalam aspek internalisasi nilai-nilai atau falsafah budaya Melayu dalam keseharian

Masyarakat hingga pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya solusi untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Melayu agar tidak musnah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat hendaknya berorientasi pada pemajuan kebudayaan.

f. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup; (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (2) Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (3) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

g. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan

pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi alternatif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kepulauan Riau. Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan energi ramah lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalisasi seiring dengan adanya peningkatan eksploitasi laut di masa yang akan datang.

Berdasarkan gambaran kondisi permasalahan dengan memperhatikan isu lingkungan Dinamis, baik global, nasional maupun provinsi, maka rumusan isu strategis Dinas P3AP2KB tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Prov Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Peningkatan produktivitas perempuan melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi ▪ Peningkatan keterlibatan dalam politik dan pengambilan keputusan ▪ Pengembangan kelembagaan forum anak ▪ Pengembangan kelembagaan pelayanan perlindungan anak dan perempuan ▪ Kerjasama dengan kelembagaan masyarakat dan tokoh agama ▪ Pertumbuhan penduduk yang terkendali	▪ Belum optimalnya jangkauan pelayanan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, terutama dalam mendapatkan data dan informasi dimasyarakat ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan penguatan terhadap lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. ▪ Kenaikan anggaran responsif gender belum optimal dalam peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga ▪ Masih lemahnya		▪ Demografi Global ▪ Urbainsasi Dunia ▪ Kelas Menengah ▪ Disrupsi Teknologi	▪ Rendahnya produktivitas ▪ Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia ▪ Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat ▪ Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	▪ Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal ▪ Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal. ▪ Kemiskinan dan Pengangguran ▪ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal ▪ Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal ▪ Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi ▪ Perubahan Iklim dan Kerusakan	▪ Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak ▪ Peningkatan pemenuhan atas hak-hak anak ▪ Penyediaan data gender dan anak dalam mendukung kualitas kebijakan pembangunan daerah ▪ Peningkatan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Prov Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ketersediaan data gender dan anak dalam mendukung analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan Kabupaten/Kota layak anak mencapai Peringkat Madya ▪ Masih ditemukannya kekerasan terhadap anak, baik dilingkungan rumah tangga, sekolah maupun pertemanan ▪ Rendahnya kemampuan keluarga menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak didunia kerja dan pernikahan dini. ▪ Masih belum optimalnya edukasi terhadap orang tua dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ▪ Belum optimalnya peningkatan pengelolaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber KB dengan kondisi cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi meningkat dan kinerja peningkatan pemakaian kontrasepsi Modern realtif kecil kenaikannya ▪ Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam peningkatan pembangunan keluarga				Lingkungan Hidup	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Bagi Perempuan dan Anak Serta Keluarga**. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai tujuan tersebut yaitu:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
3. Sasaran 3 : Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator dan target kinerjanya ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Yang Disertai Dengan Indikator Dan Target Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Bagi Perempuan dan Anak Serta Keluarga		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,339	0.331-0.328	0.327-0.322	0.321-0.316	0.315-0.310	0.309-0.304	0.303-0.298	0.303-0.298
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	67,28	70,28	71,78	73,28	74,78	76,28	77,78	77,78
		Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,96	94,46	94,71	94,96	95,21	95,46	95,71	95,71
		Sasaran 2 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	62.48*	63,73	64,98	66,23	67,48	68,73	69,98	69,98
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	84.18*	86,10	88,02	89,94	91,86	93,78	95,70	95,70
		Sasaran 3. Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Persen	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10
			Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Nilai	89,98	90,50	91,02	91,54	92,07	92,07	93,13	93,13
			Indeks Lansia Berdaya	Nilai	58,60	59,11	59,61	60,13	60,55	61,17	61,79	61,79

3.2. Strategi

Strategi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Strategi pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 meliputi:

1. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender pada lembaga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Peningkatan kualitas perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
3. Peningkatan kualitas penyedia pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak
4. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
5. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data
6. Peningkatan pelibatan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
7. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dan dunia usaha dalam pelembagaan pemenuhan hak anak
8. Penguatan dan pengembangan kelembagaan forum anak di daerah
9. Peningkatan kualitas penyedia pelayanan perlindungan khusus anak
10. Peningkatan kualitas koordinasi dan kebijakan dalam pengendalian kuantitas penduduk
11. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas P3AP2KB dalam penyelenggaraan pemerintahan
13. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan aset Dinas P3AP2KB

14. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas P3AP2KB.

Adapun prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas P3AP2KB dapat disajikan dalam tahapan berikut.

Tabel 3.2
Tahapan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola data dalam mendukung pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Pengembangan SDM, edukasi publik, dan pelibatan kelompok rentan untuk mencapai pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Akselerasi Program dan pelayanan inklusif dalam meningkatkan implementasi pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Integrasi dan inovasi lintas sektor guna memastikan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga	Penguatan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga pada seluruh sektor

1. Tahap I (2026) : Akselerasi Penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola data dalam mendukung pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:
 - a. Penguatan Regulasi/Kebijakan Berperspektif Gender dan Anak
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan PPA
 - c. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor
 - d. Penguatan Sistem Tata Kelola Data Terpilah Gender dan Anak
 - e. Peningkatan Alokasi Anggaran Responsif Gender dan Anak
 - f. Pengembangan Inovasi dan Praktik Baik
 - g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Komunitas
2. Tahap II (2027) : Pengembangan SDM, edukasi publik, dan pelibatan kelompok rentan untuk mencapai pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sensitif Gender dan Hak Anak
 - b. Edukasi dan Kampanye Publik tentang Kesetaraan Gender, Hak Anak, dan Ketahanan Keluarga
 - c. Pelibatan Aktif Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan
 - d. Penguatan Kapasitas Komunitas dan Tokoh Masyarakat
 - e. Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi yang Inklusif
 - f. Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan
3. Tahap III (2028) : Akselerasi Program dan pelayanan inklusif dalam meningkatkan implementasi pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:
- a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
 - d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
 - f. Penguatan peran ayah dalam pengasuhan dan kesetaraan gender
 - g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif
4. Tahap IV (2029) : Integrasi dan inovasi lintas sektor guna memastikan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga, dengan prioritas pada:
- a. Penguatan layanan terpadu berbasis komunitas
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Akselerasi program pemberdayaan ekonomi perempuan
 - d. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan ramah anak
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak
 - f. Penguatan peran ayah dan laki-laki dalam pengasuhan dan kesetaraan gender
 - g. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang komprehensif

5. Tahap V (2030) : Penguatan pembangunan berkeadilan bagi perempuan, anak dan keluarga pada seluruh sektor
 - a. Integrasi Perspektif Gender, Anak, dan Keluarga dalam Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Peningkatan Akses Setara terhadap Layanan Dasar Berkualitas
 - c. Penguatan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi
 - d. Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
 - e. Penguatan Ketahanan dan Fungsi Keluarga
 - f. Penguatan Data dan Informasi Terpilah untuk Kebijakan Berbasis Bukti

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan kelembagaan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak	Meningkatkan koordinasi dalam advokasi dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PUG Penguatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi Peningkatan KIE dan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
			Memperkuat pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak yang didukung dengan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	
			Memperkuat koordinasi dan pengembangan aplikasi dalam pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak di perangkat daerah	
			Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung peningkatan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	
			Pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan forum anak	
			Peningkatan keterampilan SDM dan penambahan sarana prasarana pelayanan perlindungan khusus anak	
			Memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk	
			Memperkuat advokasi dan KIE dalam pengembangan program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. Hasil cascading Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana						
Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				SAKIP Daerah (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
			Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0002 -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 -Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06.0006 -Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	
			Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07.0005 - PengadaanMebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0006 - PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0010 - PengadaanSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0003 -Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 -Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2.08.01.1.09.0001 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Capaian Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Provinsi Kepulauan Riau	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
				Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
				jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
				Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	2.08.02.1.01.0005 -Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	
				jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.1.01.0010 - BimbinganTeknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
				jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.01.0011 -Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.01.0012 - Advokasidan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Politik Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
				jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	2.08.02.1.02.0005 - Advokasipemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.02.0006 -pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
				jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	2.08.02.1.02.0009 -peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			Meningkatnya Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.02.1.03.0008 -Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.1.03.0010 -pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
				Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.1.03.0011 - Advokasidan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Jumlah Program/Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.04.1.01.0007 - Advokasidan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
			Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang didampingi dan diberi penguatan dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	2.08.04.1.02.0006 - Advokasidan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.04.1.02.0008 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	
				Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03.0002 - layananpenjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03.0004 - layanankonsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03.0005 - Layananbimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.04.1.03.0006 - Layananpenerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	2.08.05.1.01.0004 - Advokasidan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.1.01.0005 -Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	
				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		
				Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				SAKIP Daerah (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0001 -Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir	2.08.01.1.02 - Administrasi	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02.0001 -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02.0002 -Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0002 -Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05.0002 - PengadaanPakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 -Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0002 -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 -Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06.0006 -Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	
			Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07.0005 - PengadaanMebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0006 - PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0010 - PengadaanSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0003 -Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 -Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09.0001 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak		Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	2.08.07.1.01.0006 -Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	2.08.07.1.01.0007 - Advokasidan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	
				Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	2.08.07.1.03.0011 -Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	
				TFR (Angka Kelahiran Total) (%)		
	Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Penduduk Tumbuh Seimbang	Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau		Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				SAKIP Daerah (Nilai)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 -Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0002 -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06.0006 -Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.08.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	
			Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.07.0005 - PengadaanMebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0006 - PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.08.01.1.07.0010 - PengadaanSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.08.01.1.08.0003 -Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 -Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09.0001 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)		2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Tersusun dan termanfaatkannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	2.14.02.1.01.0021 - Advokasidan Sosialisasi GDPK	
			Tersedianya dokumen pemetaan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana (Dokumen)	2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2.14.02.1.02.0010 -Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
				Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana (Dokumen)	2.14.02.1.02.0012 - PemetaanProgram Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)		2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	
				Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	2.14.03.1.01.0009 - PenurunanKehamilan yang tidak diinginkan	
				Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	2.14.03.1.01.0013 - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	2.14.03.1.02.0002 -Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	
2.08.2.14.0.00.08.0001 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						
MENINGKATNYA KUALITAS DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Perempuan dari Segala Tindak Kekerasan	Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0002 -Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Menurunnya		Persentase Perempuan Korban	2.08.03 - PROGRAM	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Kekerasan Terhadap Perempuan		Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau	2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0007 - layananrumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0008 - LayananPengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0009 - layananspesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi Dengan Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.08.01.1.03.0002 -Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0001 -Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0003 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0004 -Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.1.06.0005 -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.08.01.1.06.0006 -Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				SKPD (Laporan)	Koordinasi danKonsultasi SKPD	
			Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0002 -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0003 -Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.1.08.0004 -Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.1.09.0001 -Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0005 -Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.08.01.1.09.0006 -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Jumlah kasus kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan	2.08.07.1.02 - Penyediaan	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

Berdasarkan cascading di atas, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang

digunakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

- Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
- Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi

2. Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi

- Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
- Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
- Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

3. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
- Pendampingan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi

- Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi

B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

3. Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

- Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

D. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
- Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
- Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi
- Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi
- Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

E. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

F. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

- Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

- Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
- Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
- Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

G. PPOGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PKA)

1. Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

- Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi
- monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi

2. Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi
- Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi
- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
- Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

H. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal
- Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal
- Advokasi dan Sosialisasi GDPK
- Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

2. Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

- Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

- Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

I. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal
- Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana

J. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
- Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
- Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)
- Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

2. Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas

- Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta anggaran pada Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				23.554.698.023,60		23.006.145.635,60		23.437.071.659,60		23.848.506.943,60		25.480.456.580,60
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.127.447.635,60		20.198.146.235,60		20.249.072.259,60		20.300.507.543,60		20.352.457.180,60
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	79,57	77,15	19.669.447.635,60	77,30	19.673.146.235,60	77,45	19.714.072.259,60	77,60	19.755.507.543,60	77,75	19.807.457.180,60
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB		BB		BB		BB		BB	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	76,80		77,00		77,20		77,50		78,00	
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	3	260.000.000,00	3	260.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00
2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.788.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60
Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12.788.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	41	90		90		90		90		90	
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.153.543.249,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	41	90	12.153.543.249,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan				620.000.000,00		967.034.455,00		967.034.455,00		967.034.455,00		967.034.455,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
TugasASN												
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN (Dokumen)	12	12	620.000.000,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00
2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan(Paket)	0	1	80.000.000,00	0	180.000.000,00	0	180.000.000,00	0	180.000.000,00	0	180.000.000,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		90		90		90		90	
2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				80.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan(Paket)	0	1	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				979.465.820,00		750.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	979.465.820,00	1	750.000.000,00	1	760.000.000,00	1	760.000.000,00	1	760.000.000,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	1	17.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan BangunanKantor yang Disediakan (Paket)											
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.465.820,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	122.465.820,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD (Laporan)	1	1	650.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.535.062.161,00		4.499.602.986,00		4.549.129.010,00		4.600.564.294,00		4.652.513.931,00
Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	4.535.062.161,00	10	4.499.602.986,00	10	4.549.129.010,00	10	4.600.564.294,00	10	4.652.513.931,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1	
2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				43.623.581,00		25.000.000,00		23.600.000,00		23.600.000,00		23.600.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	1	43.623.581,00	1	25.000.000,00	1	23.600.000,00	1	23.600.000,00	1	23.600.000,00
2.08.01.1.07.0006 - PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00
2.08.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.391.438.580,00		4.424.602.986,00		4.475.529.010,00		4.526.964.294,00		4.578.913.931,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	4.391.438.580,00	1	4.424.602.986,00	1	4.475.529.010,00	1	4.526.964.294,00	1	4.578.913.931,00
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah				706.376.405,00		775.000.000,00		756.400.000,00		756.400.000,00		756.400.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan (Laporan)	12	49	706.376.405,00	12	775.000.000,00	12	756.400.000,00	12	756.400.000,00	12	756.400.000,00
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	140.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				90.000.000,00		68.600.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	68.600.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				476.376.405,00		506.400.000,00		506.400.000,00		506.400.000,00		506.400.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan (Laporan)	12	49	476.376.405,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah				350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	25	350.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya (Unit)	4	5		4		4		4		4	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		1		1		1		1	
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan				210.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya (Unit)	4	5	210.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	25	70.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00
2.08.01.1.09.0009 -Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93,25	458.000.000,00	93,55	525.000.000,00	93,80	535.000.000,00	94,00	545.000.000,00	94,00	545.000.000,00
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi Dengan Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	75.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	0	1		1		1		1		1	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	0	1	5.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00
Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Laporan)	0	1	194.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan (Laporan)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				150.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	150.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00
2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan (Laporan)	0	1	44.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	169.000.000,00	2	230.000.000,00	2	230.000.000,00	2	230.000.000,00	2	230.000.000,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5		5		5		5		5	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	15		15		15		15		15	
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5	110.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00
2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	15	34.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00
2.08.01.1.09.0009 -Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.104.556.581,00		1.470.000.000,00		1.605.000.000,00		1.650.000.000,00		2.320.000.000,00
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	11,82	13,03	2.104.556.581,00	13,05	1.470.000.000,00	13,07	1.605.000.000,00	13,09	1.650.000.000,00	13,09	2.320.000.000,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,80	54,48		55,09		55,70		56,31		65,5	
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah KewenanganProvinsi				125.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		180.000.000,00		480.000.000,00
Meningkatnya Capaian Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Provinsi Kepulauan Riau	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	40	125.000.000,00	0	125.000.000,00	30	250.000.000,00	0	180.000.000,00	30	480.000.000,00
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintahdan non pemerintah) (Lembaga)	0	0		30		30		32		40	
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek(orang)	0	0		30		30		32		40	
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1		0		1		0		1	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi(laporan)	0	0		1		1		1		1	
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi				40.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		90.000.000,00
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	1	40.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	90.000.000,00
2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				0,00		25.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi(laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	90.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG KewenanganProvinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek(orang)	0	0	0,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	32	60.000.000,00	40	100.000.000,00
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG KewenanganProvinsi				85.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		100.000.000,00
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenanganprovinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	40	85.000.000,00	0	0,00	30	50.000.000,00	0	0,00	30	100.000.000,00
2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUGKewenangan Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintahdan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	0,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	32	60.000.000,00	40	100.000.000,00
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada OrganisasiKeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				1.534.384.508,00		1.080.000.000,00		1.080.000.000,00		1.120.000.000,00		1.290.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Politik Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkanbimtek atau pelatihan (Orang)	0	459	1.534.384.508,00	20	1.080.000.000,00	20	1.080.000.000,00	30	1.120.000.000,00	40	1.290.000.000,00
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	4		4		4		4		4	
	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,sosial, ekonomi (Orang)	60	160		160		160		160		160	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi(laporan)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yangmendapatkan advokasi (Lembaga)	0	1		25		25		25		30	
2.08.02.1.02.0005 – Advokasi pemberdayaan perempuan di bid ang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				32.465.806,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomiKewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	1	32.465.806,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	60.000.000,00	30	120.000.000,00
2.08.02.1.02.0006 - pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00
2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi(laporan)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atauekonomi Kewenangan Provinsi				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik. hukum.sosial. ekonomi (Orang)	60	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi				551.918.702,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		120.000.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkanbimtek atau pelatihan (Orang)	0	459	551.918.702,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	30	70.000.000,00	40	120.000.000,00
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Provinsi				445.172.073,00		265.000.000,00		275.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00
Meningkatnya Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	5	445.172.073,00	3	265.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	4	550.000.000,00
	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintahdan non pemerintah) (Lembaga)	0	2		1		1		1		2	
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuankewenangan provinsi (laporan)	0	0		1		1		1		1	
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuanyang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20		30		30		30		45	
2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuankewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuankewenangan provinsi (laporan)	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00
2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				182.843.043,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		250.000.000,00
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuankewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	20	182.843.043,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	170.000.000,00	45	250.000.000,00
2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provi si				162.329.030,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	5	162.329.030,00	3	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	4	100.000.000,00
2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuanKewenangan Provinsi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaanperempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintahdan non pemerintah) (Lembaga)	0	2	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	2	100.000.000,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				473.326.806,00		429.171.500,00		504.171.500,00		589.171.500,00		839.171.500,00
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	43,70	43,33	250.750.000,00	42,31	250.852.100,00	41,34	325.852.100,00	40,38	410.852.100,00	40,38	660.852.100,00
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi danLintas Daerah Kabupaten/Kota				100.750.000,00		100.852.100,00		120.852.100,00		150.852.100,00		220.852.100,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Jumlah Program/Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, sertaKab/Kota (Kegiatan)	0	1	100.750.000,00	0	100.852.100,00	0	120.852.100,00	0	150.852.100,00	0	220.852.100,00
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtPKewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahanKtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	20		20		20		20		20	
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama parapihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi				0,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP KewenanganProvinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtPKewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00
2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP KewenanganProvinsi				50.750.000,00		50.852.100,00		50.852.100,00		50.852.100,00		50.852.100,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsungpencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahanKtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	20	50.750.000,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan KewenanganProvinsi				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, sertaKab/Kota (Kegiatan)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan PerempuanKewenangan Provinsi				150.000.000,00		150.000.000,00		205.000.000,00		260.000.000,00		440.000.000,00
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	205.000.000,00	1	260.000.000,00	1	440.000.000,00
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuanyang mendapatkan bimtek (Orang)	30	40		30		30		30		40	
	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	0		0		7		7		10	
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				150.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		180.000.000,00
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan PerempuanKewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	30	40	150.000.000,00	30	100.000.000,00	30	120.000.000,00	30	130.000.000,00	40	180.000.000,00
2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		70.000.000,00		130.000.000,00
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenanganprovinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	70.000.000,00	1	130.000.000,00
2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan PerlindunganPerempuan kewenangan provinsi				0,00		0,00		30.000.000,00		60.000.000,00		130.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan(Lembaga)	0	0	0,00	0	0,00	7	30.000.000,00	7	60.000.000,00	10	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	93,43	96	222.576.806,00	97	178.319.400,00	98	178.319.400,00	99	178.319.400,00	99	
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi danLintas Daerah Kabupaten/Kota				222.576.806,00		178.319.400,00		178.319.400,00		178.319.400,00		
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	40	222.576.806,00	5	178.319.400,00	5	178.319.400,00	5	178.319.400,00	5	
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	5		10		10		10		10	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (orang)	0	15		5		5		5		5	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	35		35		35		35		35	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	24		15		15		15		15	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	35		45		45		45		45	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	12		10		10		10		10	
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (orang)	0	20		20		20		20		20	
2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (orang)	0	15	30.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00
2.08.03.1.02.0004 - layananpendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4.111.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat	0	5	4.111.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)											
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (orang)	0	20	30.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	24	20.000.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00
2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi danLintas Daerah Kabupaten/Kota				53.000.000,00		95.553.200,00		95.553.200,00		95.553.200,00		95.553.200,00
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	35	53.000.000,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00
2.08.03.1.02.0008 - LayananPengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				65.465.806,00		20.923.000,00		20.923.000,00		20.923.000,00		20.923.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	35	65.465.806,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00
2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota				5.000.000,00		3.373.200,00		3.373.200,00		3.373.200,00		3.373.200,00
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	12	5.000.000,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00
2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota				15.000.000,00		795.000,00		795.000,00		795.000,00		795.000,00
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	40	15.000.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				292.020.195,00		280.000.000,00		345.000.000,00		430.000.000,00		780.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%)	71,41	72,44	292.020.195,00	72,7	280.000.000,00	72,96	345.000.000,00	73,22	430.000.000,00	73,48	780.000.000,00
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak KewenanganProvinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan	0	0	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	3	100.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)											
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	3		0		0		0		0	
2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	3	100.000.000,00
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				129.863.238,00		100.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		280.000.000,00
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang didampingi dan diberi penguatan dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	129.863.238,00	0	100.000.000,00	7	150.000.000,00	7	170.000.000,00	10	280.000.000,00
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0		7		7		7		10	
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	0	3		0		0		0		0	
2.08.04.1.02.0006 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				97.397.418,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	0	3	97.397.418,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		180.000.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	0,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	110.000.000,00	10	180.000.000,00
2.08.04.1.02.0008 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				32.465.820,00		0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkanpendampingan (Lembaga)	0	1	32.465.820,00	0	0,00	7	50.000.000,00	7	60.000.000,00	10	100.000.000,00
2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				112.156.957,00		130.000.000,00		145.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00
Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	35	112.156.957,00	40	130.000.000,00	42	145.000.000,00	45	200.000.000,00	60	400.000.000,00
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	20		20		20		25		50	
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		20		20		25		40	
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	500		500		500		500		550	
2.08.04.1.03.0002 – layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	20	25.000.000,00	20	20.000.000,00	20	22.000.000,00	25	40.000.000,00	50	100.000.000,00
2.08.04.1.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	35	25.000.000,00	40	40.000.000,00	42	45.000.000,00	45	55.000.000,00	60	100.000.000,00
2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				62.156.957,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	500	62.156.957,00	500	50.000.000,00	500	55.000.000,00	500	65.000.000,00	550	100.000.000,00
2.08.04.1.03.0006 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		23.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	0	0,00	20	20.000.000,00	20	23.000.000,00	25	40.000.000,00	40	100.000.000,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		80.000.000,00
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam KelembagaanData di Tingkat Daerah Provinsi				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		80.000.000,00
Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia(Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	80.000.000,00
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak(Lembaga)	1	1		1		1		1		1	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
2.08.05.1.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak(Lembaga)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia(Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				152.465.806,00		220.000.000,00		265.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	71,43	85,71	152.465.806,00	85,71	220.000.000,00	85,71	265.000.000,00	85,71	350.000.000,00	85,71	500.000.000,00
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi				70.000.000,00		170.000.000,00		195.000.000,00		250.000.000,00		340.000.000,00
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang didampingi dan dikembangkan	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi (Orang)	0	0	70.000.000,00	50	170.000.000,00	50	195.000.000,00	60	250.000.000,00	70	340.000.000,00
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi (Lembaga)	0	4		4		5		7		10	
2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi (Lembaga)	0	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	5	80.000.000,00	7	100.000.000,00	10	160.000.000,00
2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia UsahaKewenangan Provinsi				0,00		100.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia UsahaKewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi (Orang)	0	0	0,00	50	100.000.000,00	50	115.000.000,00	60	150.000.000,00	70	180.000.000,00
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas HidupAnak Kewenangan Provinsi				82.465.806,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00
Jumlah Lembaga layanan pemenuhan hak anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pembinaan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yangmendapatkan bimtek (Orang)	0	50	82.465.806,00	50	50.000.000,00	70	70.000.000,00	60	100.000.000,00	80	160.000.000,00
	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	1		0		0		0		0	
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan EdukasiPemenuhan Hak Anak				32.465.806,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	1	32.465.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak KewenanganProvinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	70	70.000.000,00	60	100.000.000,00	80	160.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Kewenangan Provinsi yangmendapatkan bintek (Orang)											
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				384.881.000,00		388.827.900,00		438.827.900,00		488.827.900,00		608.827.900,00
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	6,15	5,91	244.770.000,00	5,79	270.507.900,00	5,68	320.507.900,00	5,56	370.507.900,00	5,56	490.507.900,00
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi danLintas Daerah Kabupaten/Kota				175.750.000,00		201.147.900,00		221.147.900,00		241.147.900,00		301.147.900,00
Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahanKtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	25	175.750.000,00	30	201.147.900,00	35	221.147.900,00	40	241.147.900,00	60	301.147.900,00
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, sertaKab/Kota (Lembaga)	0	16		30		30		30		30	
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA KewenanganProvinsi				125.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahanKtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	25	125.000.000,00	30	150.000.000,00	35	170.000.000,00	40	190.000.000,00	60	250.000.000,00
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangkukepentingan Kewenangan Provinsi				50.750.000,00		51.147.900,00		51.147.900,00		51.147.900,00		51.147.900,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, sertaKab/Kota (Lembaga)	0	16	50.750.000,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				69.020.000,00		69.360.000,00		99.360.000,00		129.360.000,00		189.360.000,00
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(Orang)	0	30	69.020.000,00	30	69.360.000,00	30	99.360.000,00	30	129.360.000,00	30	189.360.000,00
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus(Dokumen)	0	0		0		1		1		1	
	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	1	120.000.000,00
2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				69.020.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususKewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	30	69.020.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	94	96	140.111.000,00	97	118.320.000,00	98	118.320.000,00	99	118.320.000,00	99	118.320.000,00
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				140.111.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00
Jumlah kasus kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	15	140.111.000,00	15	118.320.000,00	15	118.320.000,00	15	118.320.000,00	15	118.320.000,00
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	4		2		2		2		2	
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	18		20		20		20		20	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	15		8		8		8		8	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	30		25		25		25		25	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		10		10		10		10	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	25		18		18		18		18	
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		3		3		3		3	
2.08.07.1.02.0008 – Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota				4.111.000,00		9.482.700,00		9.482.700,00		9.482.700,00		9.482.700,00
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan LintasDaerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	4.111.000,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
2.08.07.1.02.0010 – Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	25	30.000.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00
2.08.07.1.02.0011 – layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	18	20.000.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00
2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota				3.000.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	3.000.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00
2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&				3.000.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	4	3.000.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota				5.000.000,00		1.782.700,00		1.782.700,00		1.782.700,00		1.782.700,00
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas DaerahKabupaten/Kota (Orang)	0	15	5.000.000,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi danLintas Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		20.141.600,00		20.141.600,00		20.141.600,00		20.141.600,00
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota(Orang)	0	30	35.000.000,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				817.465.806,00		810.000.000,00		930.000.000,00		1.070.000.000,00		1.490.000.000,00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	68,70	69,50	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70,95	70.000.000,00	72,10	110.000.000,00	72,10	140.000.000,00
	Angka Kelahiran Remaja Umur15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19 (%)	11,10	10,50		10,20		9,90		9,60		9,60	
2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Peneendalian Kuantitas Penduduk				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Tersusun dan termanfaatkannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	110.000.000,00	1	140.000.000,00
2.14.02.1.01.0021 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	110.000.000,00	1	140.000.000,00
2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya dokumen pemetaan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana(Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	0		0		0		0		0	
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana(Bangga Kencana)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.02.1.02.0012 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pemetaan Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana(Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				160.000.000,00		160.000.000,00		220.000.000,00		280.000.000,00		420.000.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,1	11,25	160.000.000,00	10,75	160.000.000,00	10,25	220.000.000,00	10	280.000.000,00	9,75	420.000.000,00
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KBModern (%)	79,69	82,69		84,19		85,69		87,19		88,69	
	Persentase pemakaian kontrasepsiModern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	56,1	58,40		59,70		61,10		62,55		64,00	
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				110.000.000,00		110.000.000,00		150.000.000,00		190.000.000,00		280.000.000,00
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	150.000.000,00	3	190.000.000,00	4	280.000.000,00
	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.(Dokumen)	0	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, PromosiSesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	0		0		0		0		0	
2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, PromosiSesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.03.1.01.0009 – Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan				60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	100.000.000,00	4	140.000.000,00
2.14.03.1.01.0013 - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.(Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	140.000.000,00
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanandan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB (Organisasi)	1.115	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	70.000.000,00	30	90.000.000,00	40	140.000.000,00
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)(Organisasi)	0	0		0		0		0		0	
2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan danPembinaan Kesertaan Ber-KB				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB (Organisasi)	1.115	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	70.000.000,00	30	90.000.000,00	40	140.000.000,00
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)(Organisasi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGASEJAHTERA (KS)				607.465.806,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00		930.000.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	66	68	607.465.806,00	69	600.000.000,00	70	640.000.000,00	71	680.000.000,00	71	930.000.000,00
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				482.465.806,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00
Jumlah Keluarga Terlatih Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja(PIK-R) (Kelompok)	0	0	482.465.806,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	650.000.000,00
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju KeluargaBerkualitas (Keluarga)	0	25		20		20		20		20	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas KetahananKeluarga dan Remaja (Daerah)	0	2		1		1		1		1	
	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentangGenerasi Berencana (Kelompok)	0	1		5		5		5		7	
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
2.14.04.1.01.0016 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan KehidupanMenuju Keluarga Berkualitas				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju KeluargaBerkualitas (Keluarga)	0	25	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	90.000.000,00
2.14.04.1.01.0019 - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang GenerasiBerencana				32.465.806,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentangGenerasi Berencana (Kelompok)	0	1	32.465.806,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	7	90.000.000,00
2.14.04.1.01.0020 – Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	0	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00
2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja(PIK-R)				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja(PIK-R) (Kelompok)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00
2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari PertamaKehidupan (HPK)				200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00
Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				125.000.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00		180.000.000,00		280.000.000,00
Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas(Kabupaten/Kota)	0	1	125.000.000,00	3	100.000.000,00	3	140.000.000,00	3	180.000.000,00	5	280.000.000,00
	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(Organisasi)	0	20		20		20		20		30	
2.14.04.1.02.0006 - Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KeluargaBerkualitas				75.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
		2024	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas(Kabupaten/Kota)	0	1	75.000.000,00	3	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	90.000.000,00	5	140.000.000,00
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(Organisasi)	0	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	70.000.000,00	20	90.000.000,00	30	140.000.000,00

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 telah menetapkan program prioritas Pembangunan daerah lima tahun ke depan. Adapun program prioritas daerah yang didukung oleh Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas/Unggulan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.08.2.14.0.00.08.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	
			2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0006 - pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
			2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
			2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	
			2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang

disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Adapun IKU Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339	0.331-0.328	0.327-0.322	0.321-0.316	0.315-0.310	0.309-0.304	0.303-0.298	0.303-0.298	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,28	70,28	71,78	73,28	74,78	76,28	77,78	77,78	
3	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,15	2,14	2,13	2,11	2,12	2,10	2,10	2,10	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,96	94,46	94,71	94,96	95,21	95,46	95,71	95,71	

Penentuan target penyelenggaraan urusan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun IKK Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
IKK Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	positif	Indeks	79,57	77,00	77,15	77,30	77,45	77,60	77,75	
3.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	positif	%	94	95	96	97	98	99	99	
4.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	positif	%	11,82	12,41	13,03	13,05	13,07	13,09	13,09	
5.	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	positif	Persentase	71,43	71,43	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	
6.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang	positif	%	93,43	95	96	97	98	99	99	

No	Indikator	Status	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Mendapatkan Layanan Komprehensif										
7.	Rasio Kekerasan Anak	negatif	Rasio	6,15	6,03	5,91	5,79	5,68	5,56	5,56	
8.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	negatif	%	43,70	43,51	43,33	42,31	41,34	40,38	40,38	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	92,75	93,00	93,25	93,55	93,80	94,00	94,00	
10.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan	positif	%	46,51	51,16	55,81	60,46	65,11	69,79	69,79	
11.	SAKIP Daerah	positif	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	0	76,65	76,80	77,00	77,20	77,50	78,00	
13.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
14.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	12,1	11,75	11,25	10,75	10,25	10	9,75	
15.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	positif	Indeks	66	67	68	69	70	71	71	
16.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	positif	Indeks	68,70	69,25	69,50	70	70,95	72,10	72,10	
17.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19)	negatif	%	11,10	10,80	10,50	10,20	9,90	9,60	9,60	
18.	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	positif	%	79,69	81,19	82,69	84,19	85,69	87,19	88,69	
19.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	positif	%	31,61	33,11	34,61	36,11	37,61	39,11	40,61	
20.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	56,1	57,20	58,40	59,70	61,10	62,55	64,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029). Substansi utama dalam dokumen Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah bagaimana Dinas P3AP2KB mampu menyesuaikan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ke dalam konteks bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk secara lebih konkret melalui tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penekanan utama diberikan pada peningkatan kualitas perempuan, anak dan pengendalian penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh arah kebijakan dan sasaran telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 serta kerangka hukum yang berlaku secara normatif. Tersusunnya dokumen Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi alat kendali strategis bagi seluruh pelaksana pemerintahan di Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan layanan yang berkualitas dan meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Peran serta lembaga ditingkat provinsi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan kualitas pengendalian penduduk yang positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah selesai, sementara Rencana Strategis tahun 2030-2034 belum tersusun. Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Rencana Strategis berakhir, Rencana Strategis 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2045. Penyusunan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini menjadi instrumen penting dalam menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dilandaskan pada kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan yang meliputi:

1. Kepastian Hukum dan Regulasi, yakni seluruh program dan kebijakan yang dirancang senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
2. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah, di mana seluruh arah kebijakan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pendekatan Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan di Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.
4. Renstra P3AP2KB Kepulauan Riau tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 104 DP3AP2KB/VII /2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya implementasi dan mensinergikan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan arah pembangunan yang telah disusun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa kebutuhan ketersediaan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan program tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencna Strategis (Renstra);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 894);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat agenda kerja dan untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
2. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
3. Menganalisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
4. Melakukan perumusan rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
5. Membuat dan menyusun dokumen rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 02 Juli 2025


**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,**
BURHANUDDIN, S.Hut, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19710320 199803 1 008

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
- 1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 5. Kepala Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 - 6. Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor : 104 /DP3AP2KB/VI/2025
Tanggal : 02 Juli 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029**

- I. PELINDUNG/
PEMBINA
PENANGGUNG
JAWAB

: GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- II. PENGARAH

:

Ketua

: A. Ervarabianti AP, M.H

Sekretaris
DP3AP2KB

Anggota

: Dra. Sandra Liza, Apt, M.Kes

Kepala UPTD

: Herna Rosita, S.T, MH

Kabid Kualitas
Hidup Perempuan

: Renny Yuniva, S.Sos, M.Si

Kabid
Perlindungan Hak
Perempuan dan
Perlindungan
Khusus Anak

: Yulihartati, S.Sos

Kabid
Pemenuhan Hak
Anak

: Selly Andim Surya, S.IP

Kabid
Pengendalian
Penduduk dan KB
- III. PELAKSANA

:

Ketua

: A. Ervarabianti AP, M.H

Sekretaris
DP3AP2KB

Anggota

: Irwan Nasir, SE, M.Si

Perencana Ahli
Muda

: Dian Ananda Eka Dewangga, S.psi

Penelaah Teknis
Kebijakan

: Resty Lidyaningsih, AMK

Pengolah Data
dan Informasi

: Riki Cofrianto, A.Md

Pengelola Layanan
Operasional Bidang
PHP&PKA

Hartendi, S.Sos

Penata Layanan
Operasional

Een Irdayani, S.E

Penata Layanan
Operasional

IV. PERUMUS :

Anggota : Irwan Nasir, SE, M.Si

Perencana Ahli
Muda

Rosmiati Bustamam, S.Kep, M.A.P

Kasubbag.
Umum dan
Kepegawaian

Vonna Azhari, S.Psi, MM

Kasi Penerimaan,
Penjangkauan dan
Indentifikasi UPTD
P2TP2A

Wan Eka Prastyawati, S.Sos

Penggerak Swadaya
Mayarakat Ahli
Muda

Annas Rustam Aji, SE

Penggerak Swadaya
Mayarakat Ahli
Muda

Suherlina, S.Psi

Analisis Kebijakan
Ahli Muda

Shendy Devendra Amaya, S.Sos

Kasubag TU UPTD
PPA

Ani Susilo, S.Si

Analisis Kebijakan
Ahli Muda

Nurasyiah Saragih, S.Sos

Penata
Kependudukan &
KB Ahli Muda

Novita, S.Sos

Penata
Kependudukan &
KB Ahli Muda
Analisis Kebijakan
Ahli Muda

Romdiyani, S.Sos

Yuli Munir, SE

Penggerak Swadaya
Mayarakat Ahli
Muda

Melviani Puspo Yudhanti, SE

Penata
Kependudukan &
KB Ahli Muda
Kasi Rehabilitasi,
Pemulangan dan
Reintegrasi UPTD
PPA

Syarifah Fatimah, SKM, M.M

V. TENAGA AHLI

Nama : Ibnu Hiban, S.Sos



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,**

**BURHANUDDIN, S.Hut, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19710320 199803 1 008**

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					23.554.698.023,60		23.006.145.635,60		23.437.071.659,60		23.848.506.943,60		25.480.456.580,60			
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.127.447.635,60		20.198.146.235,60		20.249.072.259,60		20.300.507.543,60		20.352.457.180,60			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	79,57	77,00	77,15	19.669.447.635,60	77,30	19.673.146.235,60	77,45	19.714.072.259,60	77,60	19.755.507.543,60	77,75	19.807.457.180,60	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	76,65	76,80		77,00		77,20		77,50		78,00				
2.08.01.1.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	1	200.000.000,00	1	260.000.000,00	1	260.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		3		3		3		3				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00			
2.08.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				
2.08.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		KEPULAUAN RIAU		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00				
2.08.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.788.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60		12.778.543.249,60				
Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	12.788.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60	12	12.778.543.249,60				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1							
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	41	41	90		90		90		90							
2.08.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.153.543.249,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60		11.806.508.794,60		KEPULAUAN RIAU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	41	41	90	12.153.543.249,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60	90	11.806.508.794,60				
2.08.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					620.000.000,00		967.034.455,00		967.034.455,00		967.034.455,00		967.034.455,00		KEPULAUAN RIAU		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	620.000.000,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00	12	967.034.455,00				
2.08.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KEPULAUAN RIAU		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	15.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00				
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	30.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				
2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					30.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00			KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	30.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				
2.08.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00				
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	80.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1		0		0		0		0					
2.08.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					80.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	1	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
2.08.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		KEPULAUAN RIAU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00	90	180.000.000,00				
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					979.465.820,00		750.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00				
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1	979.465.820,00	1	750.000.000,00	1	760.000.000,00	1	760.000.000,00	1	760.000.000,00				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					17.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1	17.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
2.08.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					45.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	45.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					122.465.820,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	1	122.465.820,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00			
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.08.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					30.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					650.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	650.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00			
2.08.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.535.062.161,00		4.499.602.986,00		4.549.129.010,00		4.600.564.294,00		4.652.513.931,00			
Meningkatnya Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	10	4.535.062.161,00	10	4.499.602.986,00	10	4.549.129.010,00	10	4.600.564.294,00	10	4.652.513.931,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1		1		1		1						
2.08.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					43.623.581,00		25.000.000,00		23.600.000,00		23.600.000,00		23.600.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	1	43.623.581,00	1	25.000.000,00	1	23.600.000,00	1	23.600.000,00	1	23.600.000,00			
2.08.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	10	100.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00			
2.08.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.391.438.580,00		4.424.602.986,00		4.475.529.010,00		4.526.964.294,00		4.578.913.931,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	1	4.391.438.580,00	1	4.424.602.986,00	1	4.475.529.010,00	1	4.526.964.294,00	1	4.578.913.931,00			
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					706.376.405,00		775.000.000,00		756.400.000,00		756.400.000,00		756.400.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	706.376.405,00	1	775.000.000,00	1	756.400.000,00	1	756.400.000,00	1	756.400.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	49		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1						
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	140.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					90.000.000,00		68.600.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	90.000.000,00	1	68.600.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					476.376.405,00		506.400.000,00		506.400.000,00		506.400.000,00		506.400.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	49	476.376.405,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00	12	506.400.000,00			
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					350.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	25	350.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00	45	360.000.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	2		1		1		1						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	3	5		4		4		4						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					210.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	3	5	210.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00	4	170.000.000,00			
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					70.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	25	70.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00	45	120.000.000,00			
2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	2	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00			
Meningkatnya Akuntabilitas, Kualitas, Efektivitas Kinerja dan Pelayanan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,75	93,00	93,25	458.000.000,00	93,55	525.000.000,00	93,80	535.000.000,00	94,00	545.000.000,00	94,00	545.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 01 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
2.08.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Teradministrasi Dengan Baik	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1	75.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	1				1				1				1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1				
2.08.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.08.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
2.08.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
2.08.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	1	5.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
2.08.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.08.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					194.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1	194.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	210.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					150.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	1	150.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00			
2.08.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					44.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1	44.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
2.08.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	1	169.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1		2		2		2		2				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	15		15		15		15		15				
2.08.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					110.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0	5	110.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00	5	120.000.000,00			
2.08.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	15	34.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00			
2.08.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					20.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	20.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00	2	70.000.000,00			
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					2.104.556.581,00		1.470.000.000,00		1.605.000.000,00		1.650.000.000,00		2.320.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)	11,82	12,41	13,03	2.104.556.581,00	13,05	1.470.000.000,00	13,07	1.605.000.000,00	13,09	1.650.000.000,00	13,09	2.320.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	52,80	53,86	54,48		55,09		55,70		56,31		65,5				
2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					125.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		180.000.000,00		480.000.000,00			
Meningkatnya Capaian Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	0	1	125.000.000,00	0	125.000.000,00	1	250.000.000,00	0	180.000.000,00	1	480.000.000,00			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0		1		1		1		1				
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	40		0		30		0		30				
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	0		30		30		32		40				
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	0	0		30		30		32		40				
2.08.02.1.01.0005 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					40.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		90.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)	1	0	1	40.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	90.000.000,00			
2.08.02.1.01.0009 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi					0,00		25.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	90.000.000,00			
2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek (orang)	0	0	0	0,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	32	60.000.000,00	40	100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi					85.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	40	85.000.000,00	0	0,00	30	50.000.000,00	0	0,00	30	100.000.000,00			
2.08.02.1.01.0012 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	0	0,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	32	60.000.000,00	40	100.000.000,00			
2.08.02.1.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi					1.534.384.508,00		1.080.000.000,00		1.080.000.000,00		1.120.000.000,00		1.290.000.000,00			
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Perempuan Politik Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatatan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	60	0	160	1.534.384.508,00	160	1.080.000.000,00	160	1.080.000.000,00	160	1.120.000.000,00	160	1.290.000.000,00			
	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	0	459		20		20		30		40				
	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	0	1		25		25		25		30				
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.1.02.0005 - Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					32.465.806,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi (Lembaga)	0	0	1	32.465.806,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	60.000.000,00	30	120.000.000,00			
2.08.02.1.02.0006 - pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00			
2.08.02.1.02.0007 - monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.08.02.1.02.0008 - sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Orang)	60	0	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00	160	500.000.000,00			
2.08.02.1.02.0009 - peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi					551.918.702,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)	0	0	459	551.918.702,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	30	70.000.000,00	40	120.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					445.172.073,00		265.000.000,00		275.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00			
Meningkatnya Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	5	445.172.073,00	3	265.000.000,00	3	275.000.000,00	3	350.000.000,00	4	550.000.000,00			
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0		1		1		1		1				
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	20		30		30		30		45				
	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	2		1		1		1		2				
2.08.02.1.03.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (laporan)	0	0	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.08.02.1.03.0008 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					182.843.043,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		250.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	20	182.843.043,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	170.000.000,00	45	250.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.1.03.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi					162.329.030,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	5	162.329.030,00	3	40.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	4	100.000.000,00			
2.08.02.1.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	2	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	2	100.000.000,00			
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					473.326.806,00		429.171.500,00		504.171.500,00		589.171.500,00		839.171.500,00			
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	43,70	43,51	43,33	250.750.000,00	42,31	250.852.100,00	41,34	325.852.100,00	40,38	410.852.100,00	40,38	660.852.100,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					100.750.000,00		100.852.100,00		120.852.100,00		150.852.100,00		220.852.100,00			
Jumlah Program/Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	0	20	100.750.000,00	20	100.852.100,00	20	120.852.100,00	20	150.852.100,00	20	220.852.100,00			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	0	0	1		0		0		0		0				
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					0,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		170.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	170.000.000,00			
2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi					50.750.000,00		50.852.100,00		50.852.100,00		50.852.100,00		50.852.100,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)	0	0	20	50.750.000,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00	20	50.852.100,00			
2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi					50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Kegiatan)	0	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					150.000.000,00		150.000.000,00		205.000.000,00		260.000.000,00		440.000.000,00			
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	7	205.000.000,00	7	260.000.000,00	10	440.000.000,00			
	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	30	30	40		30		30		40						
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	0		1		1		1						
2.08.03.1.03.0005 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi					150.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		180.000.000,00			KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Orang)	30	30	40	150.000.000,00	30	100.000.000,00	30	120.000.000,00	30	130.000.000,00	40	180.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
2.08.03.1.03.0006 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		70.000.000,00		130.000.000,00			
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	70.000.000,00	1	130.000.000,00			
2.08.03.1.03.0008 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi					0,00		0,00		30.000.000,00		60.000.000,00		130.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	0	0,00	0	0,00	7	30.000.000,00	7	60.000.000,00	10	130.000.000,00			
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	93,43	95	96	222.576.806,00	97	178.319.400,00	98	178.319.400,00	99	178.319.400,00	99	178.319.400,00	2.08.2.14.0.00.08.00 01 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					222.576.806,00		178.319.400,00		178.319.400,00		178.319.400,00		178.319.400,00			
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	5	222.576.806,00	10	178.319.400,00	10	178.319.400,00	10	178.319.400,00	10	178.319.400,00			
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	40				5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	0	15		5		5		5		5				
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35		35		35		35		35				
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	24		15		15		15		15				
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35		45		45		45		45				
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	12		10		10		10		10				
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	0	20		20		20		20		20				
2.08.03.1.02.0003 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	0	15	30.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00			
2.08.03.1.02.0004 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.111.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		17.500.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	5	4.111.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00	10	17.500.000,00			
2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (orang)	0	0	20	30.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00			
2.08.03.1.02.0006 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00		10.175.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	24	20.000.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00	15	10.175.000,00			
2.08.03.1.02.0007 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					53.000.000,00		95.553.200,00		95.553.200,00		95.553.200,00		95.553.200,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35	53.000.000,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00	45	95.553.200,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					65.465.806,00		20.923.000,00		20.923.000,00		20.923.000,00		20.923.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35	65.465.806,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00	35	20.923.000,00			
2.08.03.1.02.0009 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00		3.373.200,00		3.373.200,00		3.373.200,00		3.373.200,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	12	5.000.000,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00	10	3.373.200,00			
2.08.03.1.02.0010 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					15.000.000,00		795.000,00		795.000,00		795.000,00		795.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	40	15.000.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00	5	795.000,00			
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					292.020.195,00		280.000.000,00		345.000.000,00		430.000.000,00		780.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	71,41	72,18	72,44	292.020.195,00	72,7	280.000.000,00	72,96	345.000.000,00	73,22	430.000.000,00	73,48	780.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.08.04.1.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi dalam mewujudkan Kesetaran Gender (KG) dan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	3	100.000.000,00			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	3		0		0		0		0				
2.08.04.1.01.0005 - penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	3	100.000.000,00			
2.08.04.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota					50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	0	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.04.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					129.863.238,00		100.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		280.000.000,00			
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah yang didampingi dan diberi penguatan dalam mewujudkan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	0	0	3	129.863.238,00	0	100.000.000,00	0	150.000.000,00	0	170.000.000,00	0	280.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	0		7		7		7		10				
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	1		0		7		7		10				
2.08.04.1.02.0006 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					97.397.418,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi (Lembaga)	0	0	3	97.397.418,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.04.1.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		180.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	0	0,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	110.000.000,00	10	180.000.000,00			
2.08.04.1.02.0008 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi					32.465.820,00		0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	1	32.465.820,00	0	0,00	7	50.000.000,00	7	60.000.000,00	10	100.000.000,00			
2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					112.156.957,00		130.000.000,00		145.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	112.156.957,00	20	130.000.000,00	20	145.000.000,00	25	200.000.000,00	40	400.000.000,00						
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	500				500				500				550			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35				40				42				45		60	
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	20				20				20				25		50	
2.08.04.1.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU				
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	20	25.000.000,00	20	20.000.000,00	20	22.000.000,00	25	40.000.000,00	50	100.000.000,00						
2.08.04.1.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU				
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	35	25.000.000,00	40	40.000.000,00	42	45.000.000,00	45	55.000.000,00	60	100.000.000,00						
2.08.04.1.03.0005 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					62.156.957,00		50.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU				
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	500	62.156.957,00	500	50.000.000,00	500	55.000.000,00	500	65.000.000,00	550	100.000.000,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.04.1.03.0006 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					0,00		20.000.000,00		23.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0,00	20	20.000.000,00	20	23.000.000,00	25	40.000.000,00	40	100.000.000,00			
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		80.000.000,00			
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan (%)	46,51	51,16	55,81	20.000.000,00	60,46	20.000.000,00	65,11	30.000.000,00	69,79	40.000.000,00	69,79	80.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.08.05.1.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		80.000.000,00			
Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	80.000.000,00			
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	1	0	1				1		1		1				
2.08.05.1.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak					10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	1	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00			
2.08.05.1.01.0005 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi					10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia (Dokumen)	1	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00			
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					152.465.806,00		220.000.000,00		265.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA (Persentase)	71,43	71,43	85,71	152.465.806,00	85,71	220.000.000,00	85,71	265.000.000,00	85,71	350.000.000,00	85,71	500.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					70.000.000,00		170.000.000,00		195.000.000,00		250.000.000,00		340.000.000,00			
Jumlah Lembaga/Perangkat Daerah Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang didampingi dan dikembangkan	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	0	70.000.000,00	50	170.000.000,00	50	195.000.000,00	60	250.000.000,00	70	340.000.000,00			
	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	0	4		4		5		7		10				
2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Lembaga)	0	0	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	5	80.000.000,00	7	100.000.000,00	10	160.000.000,00			
2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					0,00		100.000.000,00		115.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	0	0,00	50	100.000.000,00	50	115.000.000,00	60	150.000.000,00	70	180.000.000,00			
2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					82.465.806,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Lembaga layanan pemenuhan hak anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pembinaan	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	0	1	82.465.806,00	0	50.000.000,00	0	70.000.000,00	0	100.000.000,00	0	160.000.000,00			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	50		50		70		60		80				
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak					32.465.806,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KEPULAUAN RIAU
Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak (Kegiatan)	0	0	1	32.465.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		160.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	70	70.000.000,00	60	100.000.000,00	80	160.000.000,00			
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					384.881.000,00		388.827.900,00		438.827.900,00		488.827.900,00		608.827.900,00			
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Rasio Kekerasan Anak (Rasio)	6,15	6,03	5,91	244.770.000,00	5,79	270.507.900,00	5,68	320.507.900,00	5,56	370.507.900,00	5,56	490.507.900,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					175.750.000,00		201.147.900,00		221.147.900,00		241.147.900,00		301.147.900,00			
Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	25	175.750.000,00	30	201.147.900,00	35	221.147.900,00	40	241.147.900,00	60	301.147.900,00			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0	16		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi					125.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi (Orang)	0	0	25	125.000.000,00	30	150.000.000,00	35	170.000.000,00	40	190.000.000,00	60	250.000.000,00			
2.08.07.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi					50.750.000,00		51.147.900,00		51.147.900,00		51.147.900,00		51.147.900,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	0	16	50.750.000,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00	30	51.147.900,00			
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					69.020.000,00		69.360.000,00		99.360.000,00		129.360.000,00		189.360.000,00			
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Ditingkatkan Kapasitasnya	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	0	30	69.020.000,00	30	69.360.000,00	30	99.360.000,00	30	129.360.000,00	30	189.360.000,00			
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	0	0	0		0		1		1		1				
	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	0		0		0		0		0				
2.08.07.1.03.0006 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.08.07.1.03.0009 - penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					0,00		0,00		30.000.000,00		60.000.000,00		120.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	1	120.000.000,00			
2.08.07.1.03.0011 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					69.020.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		69.360.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Orang)	0	0	30	69.020.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00	30	69.360.000,00			
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	94	95	96	140.111.000,00	97	118.320.000,00	98	118.320.000,00	99	118.320.000,00	99	118.320.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 01 - UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					140.111.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00		118.320.000,00			
Jumlah kasus kekerasan anak yang terlayani	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	4	140.111.000,00	2	118.320.000,00	2	118.320.000,00	2	118.320.000,00	2	118.320.000,00			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	18		20		20		20		20				
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	25		18		18		18		18				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	5		10		10		10		10				
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	30		25		25		25		25				
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	15		8		8		8		8				
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	15		15		15		15		15				
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	3		3		3		3		3				
2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00	15	40.000.000,00			
2.08.07.1.02.0009 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					4.111.000,00		9.482.700,00		9.482.700,00		9.482.700,00		9.482.700,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	5	4.111.000,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00	10	9.482.700,00			
2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00		21.384.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	25	30.000.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00	18	21.384.000,00			
2.08.07.1.02.0011 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00		22.355.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	18	20.000.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00	20	22.355.000,00			
2.08.07.1.02.0012 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00		1.848.000,00		KEPULAUAN RIAU	
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	3	3.000.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00	3	1.848.000,00			
2.08.07.1.02.0013 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&					3.000.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00		1.326.000,00		KAB. BINTAN	
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	4	3.000.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00	2	1.326.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.07.1.02.0014 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000,00		1.782.700,00		1.782.700,00		1.782.700,00		1.782.700,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	15	5.000.000,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00	8	1.782.700,00			
2.08.07.1.02.0015 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					35.000.000,00		20.141.600,00		20.141.600,00		20.141.600,00		20.141.600,00		KEPULAUAN RIAU	
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	30	35.000.000,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00	25	20.141.600,00			
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					817.465.806,00		810.000.000,00		930.000.000,00		1.070.000.000,00		1.490.000.000,00			
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00			
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	68,70	69,25	69,50	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70,95	70.000.000,00	72,10	110.000.000,00	72,10	140.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 15-19) (%)	11,10	10,80	10,50		10,20		9,90		9,60		9,60				
2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00			
Tersusun dan termanfaatkannya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	110.000.000,00	1	140.000.000,00			
2.14.02.1.01.0021 - Advokasi dan Sosialisasi GDPK					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		110.000.000,00		140.000.000,00			KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Laporan)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	110.000.000,00	1	140.000.000,00			
2.14.02.1.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya dokumen pemetaan Program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	0	0				0		0		0				
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangsa Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.14.02.1.02.0012 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pemetaan Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangsa Kencana (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					160.000.000,00		160.000.000,00		220.000.000,00		280.000.000,00		420.000.000,00			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12,1	11,75	11,25	160.000.000,00	10,75	160.000.000,00	10,25	220.000.000,00	10	280.000.000,00	9,75	420.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	79,69	81,19	82,69		84,19		85,69		87,19		88,69				
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	56,1	57,20	58,40		59,70		61,10		62,55		64,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.1.01 - Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					110.000.000,00		110.000.000,00		150.000.000,00		190.000.000,00		280.000.000,00			
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	0	3	110.000.000,00	3	110.000.000,00	3	150.000.000,00	3	190.000.000,00	4	280.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	1	0				0		0		0				
	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	0	0	1				1		1		1				
2.14.03.1.01.0001 - Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal (Laporan)	0	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.14.03.1.01.0009 - Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan					60.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan (Daerah)	0	0	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	100.000.000,00	4	140.000.000,00			
2.14.03.1.01.0013 - Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. (Dokumen)	0	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	140.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00			
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	0	0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	70.000.000,00	0	90.000.000,00	0	140.000.000,00			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	1.115	0	25		25		25		30		40				
2.14.03.1.02.0002 - Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Organisasi)	1.115	0	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	70.000.000,00	30	90.000.000,00	40	140.000.000,00			
2.14.03.1.02.0004 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KEPULAUAN RIAU	
Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Organisasi)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					607.465.806,00		600.000.000,00		640.000.000,00		680.000.000,00		930.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) (Indeks)	66	67	68	607.465.806,00	69	600.000.000,00	70	640.000.000,00	71	680.000.000,00	71	930.000.000,00	2.08.2.14.0.00.08.00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	31,61	33,11	34,61		36,11		37,61		39,11		40,61				
2.14.04.1.01 - Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					482.465.806,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00			
Jumlah Keluarga Terlatih Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	1	1	1	482.465.806,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	650.000.000,00			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0	25		20		20		20		20				
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	0	0	2		1		1		1		1				
	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana (Kelompok)	0	0	1		5		5		5		7				
	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	0	0	0		1		1		1		1				
2.14.04.1.01.0016 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0	0	25	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	90.000.000,00			
2.14.04.1.01.0019 - Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana					32.465.806,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana (Kelompok)	0	0	1	32.465.806,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	7	90.000.000,00			
2.14.04.1.01.0020 - Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Daerah)	0	0	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.14.04.1.01.0021 - Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) (Kelompok)	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00			
2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)					200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Laporan)	1	1	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00			
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					125.000.000,00		100.000.000,00		140.000.000,00		180.000.000,00		280.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	0	0	20	125.000.000,00	20	100.000.000,00	20	140.000.000,00	20	180.000.000,00	30	280.000.000,00			
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	0	0	1		3		3		3		5				
2.14.04.1.02.0006 - Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas					75.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas (Kabupaten/Kota)	0	0	1	75.000.000,00	3	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	90.000.000,00	5	140.000.000,00			
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		KEPULAUAN RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Organisasi)	0	0	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	70.000.000,00	20	90.000.000,00	30	140.000.000,00			

Jl. Sultan Mansyur Syah-Pulau Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang
Kode Pos 29124, Pos-el:dp3ap2kb@gmail.com
Laman: <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**